

346.05
S117
p 21

**PEMBERIAN HIBAH DAN HIBAH WASIAT KEPADA ANAK
PEREMPUAN SEBAGAI PENEROBOSAN DALAM
MENDAPATKAN HARTA DARI PEWARIS
DI KECAMATAN GIRSANG
SIPANGAN BOLON**

Tesis

Untuk memenuhi sebagai persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro



MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA, SH.

B4B 001166

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2003

LEMBAR PENGESAHAN
PEMBERIAN HIBAH DAN HIBAH WASIAT KEPADA ANAK
PEREMPUAN SEBAGAI PENEROBOSAN DALAM
MENDAPATKAN HARTA DARI PEWARIS
DI KECAMATAN GIRSANG
SIPANGAN BOLON

Disusun Oleh :

MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA, SH.

B4B 001166

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 15 September 2003 dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Tesis ini telah Diterima Sebagai Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Dosen Pembimbing

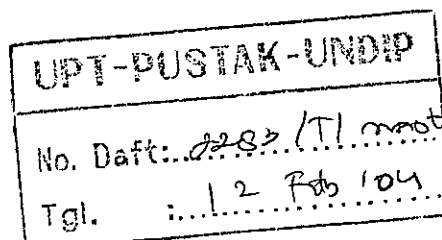
Prof. I.G.N. SUGANGGA, SH.
NIP. 130 359 063



Mengetahui

Ketua Program

Prof. I.G.N. SUGANGGA, SH.
NIP. 130 359 063



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.

Semarang September 2003

Yang Membuat Pernyataan



(Munir Syawal Pandapotan Sinaga,SH)

ABSTRAK

Dianutnya sistem patrilineal dalam sistem pewarisan adat Batak membawa konsekwensi, dimana hanya pihak laki yang mempunyai hak waris atas harta warisan orang tuanya, sedangkan pihak perempuan tidak mempunyai hak waris atas harta warisan orang tuanya. Tetapi dengan perkembangan jaman yang terjadi pada saat ini, sistem patrilineal yang dianut dalam pewarisan adat Batak tersebut tidak selamanya dianut oleh masyarakat adat Batak, khususnya yang berada di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, hal ini di dukung oleh keterangan para responden anak perempuan yang pernah mendapat harta warisan dari orang tuanya, dimana harta warisan tersebut diberikan oleh pewaris dengan cara hibah ataupun hibah wasiat.

Adanya perubahan yang terjadi dalam pewarisan adat batak tersebut dipengaruhi antara lain perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor agama, faktor perantauan/migrasi dan faktor komunikasi teknologi informasi dan juga yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris dan bersifat Deskriptif Analitis, yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya hukum waris adat Batak yang telah mengalami perkembangan sekarang ini, khususnya yang terjadi dalam masyarakat adat Batak di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon. Sumber/responden dari penelitian ini adalah pihak perempuan yang mendapat harta warisan dari orang tuanya, pemuka adat dan pemuka agama yang dilakukan dengan cara wawancara.

Dari hasil penelitian yang di dapat, maka dalam perkembangannya pada masa sekarang ini, khususnya pada masyarakat Batak yang berada di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, hukum waris adat batak sudah memberikan hak yang sama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dalam hal pembagian warisan.

ABSTRACT

Inheritance system in Batak is using patrilineal system. Because of that, men are the only one who have the inheritance right of their parents's property, meanwhile, the women side have no right of it. But, along to the improvement in this century, the society in Batak no longer use the patrilineal system in distributing their property, especially in Girsang Sipangan Bolon Subdistrict. It is supported by the explanation given by respondents who are the daughters in their family. They have accepted the inheritance of their parents, in which those properties are being given to the heir in form of bequest and grant.

This alteration in the Batak's tradition of inheritance is influenced by some factors. Such as, social change in the way of life in Indonesian society, education factor, economical factor, religion factor, migration / abroad factor and information technology communication factor and also jurisdiction from the Supreme Court.

The method which is used in this research is Empirical Juridical method, the characteristic is Analitical Descriptive. It will describe, explain, and reveal about the development which is happened in the law of inheritance according to Batak's custom nowadays, especially in the Batak's society of Girsang Sipangan Bolon Subdistrict. The respondents of this research are the women who accepted their parents' properties, custom leader and religion leader, and the explanation is obtained by doing interviews.

From the result of this research we can know that, because of the system's development nowadays, especially inside the Batak's society at Girsang Sipangan Bolon Subdistrict, the law of inheritance according to the Batak's tradition has determined that there is the same right between men and women in the matter of inheritance.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatNya begitu besar yang telah dicurahkan kepada penulis, sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan tepat pada waktunya yang telah ditentukan.

Dalam proses pembuatan tesis ini, dari sejak penelitian hingga penyusunannya, penulis telah mendapatkan begitu banyak bantuan, baik itu berupa materi, tenaga serta pikiran. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Ir.Eko Budihardjo,M.Sc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak H.Achmad Busro,S.H,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof.I.G.N.Sugangga,S.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak R.Suharto,S.H,M.Hum, selaku Sekretaris Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu H.Sri Sudaryatmi,S.H,M.Hum, selaku pereviewer Proposal Tesis.
6. Bapak Sukirno,S.H,M.Si, selaku pereviewer Proposal Tesis.
7. Bapak Junanto,S.H,M.H, selaku pereviewer Proposal Tesis.

8. Bapak Suryono Sutarto, S.H, M.Hum, selaku Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Segenap Guru Besar dan Staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang secara profesional telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Kedua orang tua penulis, Ayahnda DJ.Sinaga, SH dan Ibunda K.Simarmata yang telah membiayai penulis hingga mencapai gelar Magister Kenotariatan.
11. Kakak Maryana Sinaga, SH dan Lae P.Sinurat, SH, beserta keponakanku Josua dan Pedro, atas dukungan dan bantuannya.
12. Adikku Devi Sinaga, Asnan Sinaga, dan Natar Sinaga atas dukungannya.
13. Para responden khususnya yang telah memberikan informasi yang berharga kepada penulis dan juga kepada seluruh masyarakat yang berada di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon pada umumnya.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2001, yang telah memberikan bantuan selama masa perkuliahan dan memberi semangat serta dorongan dalam penyelesaian tesis ini.
15. Sahabat-sahabatku Ernest Tampubolon, S.E, Serirama Simarmata, S.T, dan Hendrik, S.H, yang telah memberikan semangat kepada penulis.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian dan penyusunan tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan umumnya dan bagi Hukum Waris adat Batak Khususnya.

Semarang, September 2003

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| PERNYATAAN..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| ABSTRACT..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Hukum Waris..... | 9 |
| B. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat..... | 15 |
| C. Subyek Dan Obyek Hukum Waris Adat..... | 19 |
| D. Pelaksanaa/Proses Pembagian warisan..... | 31 |
| E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Dalam Hukum Waris.... | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Metode Pendekatan..... | 39 |
| B. Spesifikasi Penelitian..... | 40 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| C. Lokasi Penelitian..... | 40 |
| D. Populasi Dan Teknik Sampling..... | 40 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| F. Jenis Dan Sumber Data..... | 43 |
| G. Analisa Data..... | 43 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

| | |
|---|----|
| A. Sejarah Masyarakat Batak Dan Gambaran Singkat Lokasi Penelitian..... | 44 |
| 1. Sejarah Masyarakat Batak..... | 44 |
| 2. Gambaran Singkat Penelitian..... | 48 |
| B. Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Batak di Kecamatan Girsang | |
| Sipangan Bolon..... | 49 |
| 1. Sistem Pewarisan Dalam Masyarakat Adat Batak Dan Perkembangannya..... | 49 |
| 2. Unsur-Unsur Yang Terdapat Dalam Hukum Waris Adat Batak Dan Perkembangannya..... | 55 |
| 3. Pelaksanaan/Proses Pembagian Warisan Dan Perkembangannya..... | 64 |
| C. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Perkembangan Dalam Pembagian Warisan..... | 67 |
| D. Penyelesaian Perselisihan Dalam Waris Adat Batak..... | 71 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 76 |
| B. Saran..... | 77 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada garis khatulistiwa. Penduduk yang berdiam di pulau-pulau itu bermacam-macam ragam budaya dan adat istiadatnya. Berbeda karena sejarah perkembangan budayanya, pergaulan hidup, tempat kediaman dan lingkungan alamnya. Ada masyarakat yang lebih banyak dipengaruhi agama Hindu, Islam, Kristen, dan Budha. Adat istiadat yang ber "Bhineka Tunggal Ika " (walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat kemanusiaannya).

Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat melaksanakan aturan tingkah laku sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat, tetapi bukan merupakan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi yang mempunyai sifat hukum serta merupakan hukum adat. Sanksinya adalah berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan.

Reaksi adat masyarakat hukum yang bersangkutan ini dalam pelaksanaannya sudah barang tentu dilakukan oleh penguasa masyarakat hukum tersebut. Ter Haar dengan teori keputusannya mengatakan bahwa untuk melihat apakah suatu adat sudah merupakan hukum adat, maka kita dapat melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap si pelanggar adat istiadat itu. Kalau terhadap si

pelanggar adat istiadat tersebut, penguasa menyatakan putusan hukuman maka adat itu sudah merupakan hukum adat.¹

Disamping mempunyai sanksi, hukum adat juga mempunyai ciri, yaitu adanya sifat kekeluargaan, sifat bantu membantu, sifat gotong royong serta rasa sayang dan cinta kasih.²

Hukum adat di Indonesia, seperti halnya dengan semua sistem hukum di bagian lain dunia ini, hukum adat itu tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang seluruhnya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Menurut Bushar Muhammad, tidak mungkin suatu hukum tertentu yang asing itu bertentangan dengan kemampuan orang terbanyak dalam masyarakat yang bersangkutan atau tidak tercukupi rasa keadilan rakyat yang bersangkutan, atau bertentangan dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan.

Seiring dengan makin meningkatnya kemajuan jaman dan adanya era globalisasi maka hal ini juga akan berpengaruh pada perkembangan masyarakat hukum di Indonesia. Seperti diketahui bahwa pada masyarakat hukum Indonesia sekarang ini sudah banyak terdapat perubahan dan pergeseran nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi ataupun mengubah pengertian dan penilaian di semua lapangan, termasuk lapangan hukum perkawinan, hukum waris dan juga akan mengubah makna atau isi kepatutan, keharusan dan keadilan.

¹ Soerjono Wignjodipero, "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat", Gunung Agung, Jakarta 1985, Hal.17.

² I.G.N.Sugangga, "Hukum Adat Khusus (Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Yang Bersistem Patrilineal di Indonesia)", Semarang, Hal.30.

Hukum Adat tidak dapat dipisahkan dari alam kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, karena setiap anggota masyarakat di masing-masing daerah tersebut selalu patuh pada Hukum Adat, yaitu yang merupakan hukum yang tertulis, yang mana hukum tersebut telah mendarah daging dalam hati sanubari anggota masyarakat yang dapat tercermin dalam kehidupan di lingkungan masyarakat tersebut.

Sehingga melalui Hukum Adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tersebut, yang mana kebiasaan itu sudah mendarah daging pada masyarakat secara turun temurun, Hukum Adat dikatakan bersifat tradisional. Selain Hukum Adat dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat, serta dapat pula menerima pengaruh diberbagai agama dan kebudayaan. Agama dan kebudayaan merupakan bagian dari adat istiadat yang ada dalam masyarakat Indonesia, oleh karena itu adanya perbedaan pada agama dan kebudayaan tersebut akan banyak membawa perbedaan pada sistem Hukum Adat di Indonesia. Dengan dijajahnya bangsa Indonesia oleh pemerintahan kolonial Belanda, hal ini juga menjadikan adanya perbedaan pada sistem Hukum Adat di Indonesia, dimana pemerintahan kolonial Belanda sengaja memecah persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia, menjadi berbeda-beda golongan-golongan, suku bangsa, dan juga macam-macam sistem hukum.

Jadi dalam Negara Republik Indonesia, sampai sekarang masih berlaku hukum waris yang bersifat pluralistik, yaitu : ³

1. Hukum Waris Adat, untuk Warga Negara Indonesia asli.
2. Hukum Waris Islam, untuk Warga Negara Indonesia asli di berbagai daerah dan kalangan tertentu yang terdapat pengaruh hukum Agama Islam.
3. Hukum Waris Barat, untuk Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Cina, yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Khususnya dalam Hukum Waris Adat, ada perbedaan Hukum Waris Adat di daerah yang satu dengan daerah yang lainnya di Indonesia. Sebagai contoh, Hukum Waris Adat di daerah Sumatera Utara (Batak) menganut sistem Patrilineal, hukum waris adat di daerah Sumatera Barat (Minang Kabau), menganut sistem Matrilineal.

Menurut Prof.Dr.R.Soepomo,SH, pengertian Hukum Waris Adat adalah: ⁴ Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari suatu generasi manusia kepada keturunannya.

Terkadang harta benda seorang laki-laki yang meninggal tidak dibagi-bagi selama masih ada janda dan anak-anak yang belum dewasa, dan satu persatu meninggalkan rumah mereka dan membangun mahligai rumah tangga sendiri. Akan tetapi ada juga pembagian harta benda yang dilakukan diantara para ahli waris

³ Nani Suwondo, "Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat", Ghalia Indonesia, Jakarta, April 1981, Hal.108.

⁴ R.Soepomo, "Bab-Bab Tentang Hukum Adat", Penerbit Pradnya Paramita", Jakarta 2000, Hal.84.

dimulai pada saat orang tua (pewaris) masih hidup, biasanya dilakukan pada saat anak-anaknya mendirikan rumah tangga sendiri, maka mereka diberikan modal untuk itu, barang-barang yang diberikan (dihibahkan) pada waktu ini, kemudian akan ikut di hitung pada saat kemudian pembagian harta warisan dilakukan.

Masalah pembagian warisan di sebagian besar masyarakat di Indonesia, pada umumnya dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Akan tetapi sering juga, mengenai pembagian warisan ini menjadi perselisihan diantara para ahli waris, terutama bila mereka masing-masing merasa tidak puas pada bagian warisan mereka. Oleh karena itu, bila terjadi perselisihan dalam pembagian warisan biasanya diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila cara tersebut tidak berhasil, sering pula terjadi masalah sengketa warisan yang diteruskan pada adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri.

Khususnya di masyarakat suku Batak, pada umumnya yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja. Tetapi tidak berarti dalam hal ini anak-anak perempuan tidak mendapat apapun dari harta benda orang tuanya. Untuk anak perempuan biasanya diberikan harta benda yang berharga pada waktu ia menikah, misalnya pada suku Batak Toba telah menjadi kebiasaan bagi orang tua untuk memberi tanah kepada anak perempuan yang telah menikah sebagai bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangganya.

Dari uraian diatas tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Batak Dan Perkembangannya Menurut Hukum Waris Adat di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemberian Hibah dan Hibah Wasiat kepada anak perempuan sebagai penerobosan dalam mendapatkan harta dari pewaris di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.
2. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi perkembangan dalam pemberian Hibah dan Hibah Wasiat kepada anak perempuan di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.
3. Bila terjadi perselisihan dalam hal pembagian warisan Adat Batak, bagaimanakah cara penyelesaian yang sering ditempuh.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemberian Hibah dan Hibah Wasiat kepada anak perempuan sebagai penerobosan dalam mendapatkan harta dari pewaris di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan dalam pemberian Hibah dan Hibah Wasiat kepada anak

perempuan sebagai penerobosan dalam mendapatkan harta dari pewaris di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.

3. Untuk mengetahui cara penyelesaian yang sering ditempuh apabila terjadi perselisihan dalam hal pembagian warisan Adat Batak.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan kiranya dapat dijadikan :

1. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum, khususnya Hukum Adat.
2. Sebagai bahan masukan lainnya yang berkaitan dengan masalah pewarisan, khususnya penelitian pewarisan pada masyarakat Adat Batak di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan; yang berisi uraian tentang : Latar belakang permasalahan, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka; yang berisi uraian tentang : Pengertian Hukum Waris, Sistem pewarisan dalam Hukum Adat, Subjek dan objek Hukum Waris Adat, Pelaksanaan/proses pembagian warisan, Serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam Hukum Waris.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Analisa; yang berisikan uraian tentang : Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pewarisan yang ditinjau dari Hukum Waris Adat Batak khususnya pembagian warisan.

BAB V : Penutup; yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertakan pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Waris

Dalam masyarakat Indonesia dikenal adanya tiga sistem hukum waris yaitu: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian dan makna dari Hukum Waris Adat sampai saat ini masih beragam.

Ter Haar menyatakan, Hukum Waris Adat itu meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad, proses penerusan dan peralihan kekayaan material dan immaterial dari turunan ke turunan.⁵

Soepomo merumuskan Hukum Adat Waris sebagai berikut : Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan harta serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia pada turunannya dimana proses itu telah mulai dan waktu orang tua masih hidup. Proses meninggalnya pewaris tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta

⁵Ter Haar, Terjemahan Soebakti Poesponoto, "Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat", Gunung Agung, Jakarta, 1981, Hal.231.

bukan benda tersebut. Proses itu berjalan terus hingga angkatan baru yang di bentuk dengan mencar dan mentasnya anak-anak yang merupakan keluarga-keluarga baru, mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tuanya sebagai fundamen.⁶

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, memberi pengertian sebagai berikut : Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁷

Dari beberapa pendapat para sarjana tersebut diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa Hukum Waris Adat itu adalah suatu aturan yang berisikan ketentuan tentang cara-cara penerusan dan pengalihan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya yang dapat dilakukan baik pada waktu pewaris masih hidup ataupun sesudah pewaris meninggal dunia.

Menurut Mr.Djojo Digoeno, asas yang terkandung dalam ketentuan waris adat adalah :

1. Pewarisan adalah berpindahnya harta kekayaan seorang manusia kepada angkatan tunas (generasi) yang menyusul.
2. Pewarisan tidak tentu berarti pembagian peninggalan itu, mungkin pembagiannya harus ditunda, mungkin juga sama sekali tidak diperkenankan.

⁶ Soepomo, "Op Cit", Hal.82.

⁷ Wirjono Projodikoro, "Hukum Waris Di Indonesia", Bale Bandung, Bandung 1986, Hal.8.

3. Dikenal lembaga hidup waris (plaatsvervuëling).
4. Orang laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama haknya.
5. Tidak dikenal hibah pada orang yang sedianya mewaris, semua pemberian harus diartikan sebagai "pewarisan".
6. Harta peninggalan tidak terbatas pada orang-orang yang nyata dimiliki si peninggal harta pada saat matinya saja.⁸

Jika sistem pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya dapat berlangsung karena kematian. Jadi harta peninggalan pewaris baru dapat dibagikan kepada para ahli waris kalau pewaris telah meninggal dunia. Berbeda dengan pewarisan adat, kalau pewarisan menurut Hukum Adat dapat dilangsungkan baik pada saat masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia.

Disamping itu, Hukum Waris Perdata pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris.

Menurut Effendi Perangin, sifat Hukum Waris Perdata menganut :

1. Sistem pribadi, bahwa yang menjadi ahli waris adalah perseorangan, bukan keluarga ahli waris.
2. Sistem bilateral, yaitu mewaris baik dari pihak ibu maupun pihak bapak.
3. Sistem penderajatan, bahwa ahli waris yang derajatnya baik lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya dengan si pewaris.⁹

⁸ Irma Setyawati Soemitro, "Beberapa Aspek Kewarisan Pada Kekerabatan Matrilinial", Badan Penerbit UNDIP, Semarang 1994, Hal.43.

⁹ Effendi Perangin, "Hukum Waris", Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999, Hal.4.

Maka hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hak tiap-tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan. Segala barang harta peninggalan itu merupakan satu kesatuan abstrak, yang dapat dinilai dengan sejumlah uang yang tertentu banyaknya dan yang tiap-tiap waktu dapat di bagi-bagi pada waktu meninggalnya pewaris. Jika mungkin, pembagian warisan akan dilakukan dengan jalan membagi barang-barang, akan tetapi jika pembagian demikian tidak dapat dilakukan, maka pembagian akan seperti membagi sejumlah uang yang akan diterima, apabila barang-barang harta peninggalan itu dijual.

Sehingga Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disamping mengatur hak-hak tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan, mengatur bagian warisan menurut ketentuan Undang-Undang, juga menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan.¹⁰

Sedangkan pada hukum waris menurut Hukum Islam pewarisan dilakukan berdasarkan ketentuan Al Qur'an dan Hadits. Dan pewarisan baru dapat terjadi apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Matinya pewaris (yang mewariskan), secara hakiki maupun hukum (secara hukum).
2. Hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris, secara hakiki maupun hukum.

¹⁰ Soerojo Wignjodipoero, "Op Cit", Hal.163.

3. Tidak ada penghalang dalam pewarisan.¹¹

Dengan demikian kematian pewaris adalah merupakan dasar untuk terjadinya pewarisan. Hukum Waris Islam memuat ketentuan-ketentuan, apabila pewaris wafat maka para ahli warisnya mempunyai hak atas pembagian harta warisan tertentu sewaktu-waktu. Warisan yang dimaksud adalah harta warisan yang bersih dari segala kewajiban menurut ketentuan agama seperti hutang, biaya penguburan dan adanya wasiat pewaris.

Dalam sistem pewarisan Hukum Islam diatur cara-cara pembagian harta peninggalan agar dapat bermanfaat bagi ahli waris secara adil dan baik. Oleh karena itu harta peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari si pewaris baik yang ia dapati sendiri dengan usaha perseorangan atau pemberian sah dari orang lain atau warisan turun-temurun, maka agama Islam menganggap bahwa pengaturan tentang warisan itu adalah urusan keluarga ahli waris, tidak dapat dicampuri oleh orang luar yang tidak termasuk anggota keluarga yang berhak.¹²

Sistem pewarisan menurut Hukum Islam berbeda dalam sistem pewarisan dalam Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat, dimana dalam sistem pewarisan dalam Hukum Islam terdapat perbedaan jumlah bagian warisan bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat An Nisa

¹¹ Muhammad Abuzuhrah, "Hukum Waris menurut Imam Ja'far Shadig", Lentera, Jakarta 2001, Hal. 70.

¹² Tamakiran, "Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum", Pionir Jaya, Bandung 1992, Hal. 84.

ayat 11 bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹³

Dalam masyarakat bersistem kekeluargaan parental Hukum Waris Adatnya menetapkan dasar persamaan hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan memperoleh harta benda keluarganya, Hukum Waris Adat juga meletakkan dasar ketentuan pada proses pelaksanaan pembagian dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris, karena pelaksanaan pembagiannya bisa ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.

Harta warisan adat tidak merupakan satu kesatuan, harus diperhatikan sifat, asal dan kedudukan hukum dari pada barang-barang warisan tersebut. Akibat dari aliran pikiran bahwa harta benda keluarga itu dari semula disediakan sebagai dasar material kehidupan keluarga dan keturunannya ialah adanya peraturan penggantian waris (suatu sistem dimana apabila ahli waris lebih dahulu meninggal dari pewaris tetapi mempunyai keturunan maka anak-anak dari ahli waris itu berhak mengganti kedudukan dari orang tuanya untuk mendapatkan bagian dari harta kakek neneknya).

Untuk pembagian warisan, barang-barang warisan tersebut dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan biaya lainnya. Jadi pewarisan bukan hanya sekedar peralihan atau pengoperan harta warisan saja, tetapi juga peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli warisnya.

¹³ A. Hasan Al Faraid, "Ilmu Pembagian Waris", Pustaka Progresif, Surabaya 1984, Hal.44.

B. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat

Hukum Adat tidak akan dipisahkan dari masyarakat Indonesia untuk siapa Hukum Adat itu berlaku. Hukum Adat tumbuh berkembang dan dipertahankan menurut kebutuhan masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia dalam kehidupannya tidak lepas dari suasana magis religius, dimana sejak dahulu mereka telah percaya bahwa dalam kehidupan ini ada sesuatu yang gaib, mengatur kehidupannya, makanya mereka sering melakukan upacara-upacara keagamaan, selamat-selamatan dan mengenal adanya adanya pantangan-pantangan.

Sesudah bangsa Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia mengakui bermacam-macam agama dan kepercayaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dijamin dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampaknya mempunyai pengaruh dalam sistem pewarisan Hukum Adat.

Maka seperti yang dikemukakan oleh Eman Suparman,¹⁴ sistem keturunan atau kekeluargaan waris adat itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu :

¹⁴ Eman Suparman, "Intisari Hukum Waris Indonesia", Armico, Bandung 1985, Hal.49.

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan atau kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki, sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” kemudian masuk menjadi anggota pihak suami, maka selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang telah meninggal dunia. Contoh lain sistem patrilineal adalah pada masyarakat suku Bali, Gayo, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian.
2. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan atau kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, dimana sistem kekeluargaan ini, pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota dari keluarganya sendiri. Contohnya : pada masyarakat Minang Kabau, Enggano, Timor.
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan atau kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan barang orang tua mereka. Contoh : pada masyarakat Jawa, Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain.

Hazairin menyebutkan ada tiga sistem kewarisan adat yaitu : ¹⁵

1. Sistem Kewarisan Individual.

Adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual diantara para ahli waris. Sistem ini disebabkan karena tiap-tiap keluarga yang telah mentas dan mencar itu hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada keluarganya yang utama.

Warisan yang dimanfaatkan sebagai fondasi untuk melangsungkan hidup dan berkembangnya keluarga tersebut. Oleh karena itu dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan bagiannya masing-masing.

Kelebihan dari sistem pewarisan individual adalah dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya. Sedangkan kelemahan dari sistem pewarisan individual adalah selain harta warisan tersebut menjadi terpecah-pecah, dapat berakibatkan putusya hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti asas hidup kebersamaan dan tolong menolong menjadi lemah diantara keluarga ahli waris tersebut. Hal ini kebanyakan terjadi di kalangan masyarakat adat yang berada di perantauan, dan telah berada jauh dari kampung halamannya . ¹⁶

¹⁵ KH.Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Waris Islam", UII Press, Yogyakarta 2001, Hal.122.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, "Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Agama Hindu-Islam", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1991, Hal.15.

2. Sistem Kewarisan Kolektif.

Adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwaris oleh sekelompok waris yang merupakan persekutuan hukum, karena harta itu merupakan harta pusaka yang tidak dapat dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara individual.

Sistem ini banyak digunakan dalam masyarakat matrilineal di Minang Kabau dengan nama Tanah Pusaka yang diurus bersama dibawah penguasaan Mamak Kepala waris atau yang dikenal dengan harta pusaka tinggi dan dalam batas-batas tertentu digunakan dalam masyarakat parental di Minahasa, masyarakat patrilineal di Ambon dengan nama Tanah Dati.

Kelemahan dari sistem pewarisan kolektif adalah : ¹⁷

- Tanah pusaka terbengkalai tidak diurus dan diusahakan dan rumah pusaka lambat laun menjadi lapuk dan rubuh.
- Sering terjadi perselisihan diantara anggota kelompok keluarga/kerabat dikarenakan ada diantara mereka yang ingin menguasai dan memiliki secara pribadi, atau menjualnya secara pribadi kepada pihak ketiga.

3. Sistem Kewarisan Mayorat.

Adalah sistem kewarisan dimana pada saat wafat pewaris, anak laki-laki tertua (di Bali, Lampung dan Batak) atau perempuan (suku Semendo dan suku Dayak) berhak tinggal untuk mewaris seluruh atau sejumlah harta pokok dari harta peninggalan. Sistem Mayorat ini ada dua macam, dikarenakan perbedaan keturunan

¹⁷Ibid, Hal.17.

yang dianut, yaitu mayorat laki-laki dan dewasa dan telah berumah tangga untuk diperuntukkan bagi biaya hidup rumah tangga mereka.

Apabila sistem kewarisan dihubungkan dengan prinsip garis keturunan maka, sifat individual atau kolektif maupun mayorat” dalam hukum kewarisan perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat dimana untuk kewarisan berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti ditanah Batak. Selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di tanah semendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa, Sulawesi Utara.

C. Subyek Dan Obyek Hukum Waris Adat

Yang merupakan subjek dan objek hukum yang terdapat dalam Hukum Waris Adat adalah : ¹⁸

a Pewaris

Merupakan subjek dalam hukum waris adat, yaitu orang yang mempunyai harta peninggalan (warisan) selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, harta peninggalan akan diteruskan penguasaan atau pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau dalam keadaan terbagi-bagi.

¹⁸ Ibid, Hal.26-30.

Jenis-jenis pewaris adalah :

a.1.Pewaris Laki-Laki (Ayah)

Yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki, yaitu ayah dan pihak ayah (saudara laki-laki dari ayah), hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan laki-laki (masyarakat patrilineal) sebagaimana berlaku di Batak, Bali, Lampung, NTT, Maluku dan lain-lain.

Dapat dibedakan menjadi :

- Pewaris Pusaka Tinggi.

Pewaris laki-laki yang ketika ia meninggal dunia meninggalkan hak-hak penguasaan atas harta pusaka tinggi, yaitu harta warisan dari beberapa generasi ke atas, atau disebut juga harta nenek moyang. Dapat dibedakan juga menjadi :

= Pewaris Mayorat Laki-Laki.

Berlaku dikalangan masyarakat adat Lampung Pepaduan, yaitu penguasa tunggal atas semua harta pusaka tinggi.

= Pewaris Kolektif Laki-Laki.

Berlaku dikalangan masyarakat adat Batak, Bali, NTT, Maluku, yaitu penguasa bersama atas semua harta pusaka tinggi, yang dipimpin oleh pewaris sulung (tertua), pewaris bungsu (termuda) atau salah satu dari pewaris yang cakap.

- Pewaris Pusaka Rendah.

Pewaris laki-laki yang ketika ia meninggal dunia meninggalkan penguasaan atas harta bersama yang dapat dibagi-bagi oleh para ahli waris.

a.2.Pewaris Perempuan (Ibu).

Yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak perempuan, yaitu ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orang tua (masyarakat matrilineal), pewaris perempuan tersebut dalam menguasai dan mengelola harta pusaka didampingi oleh saudara lelakinya, misalnya di Minang Kabau dengan didampingi oleh mamak kepala waris.

a.3.Pewaris Orang Tua (Ayah dan Ibu).

Yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki dan perempuan bersama, yaitu ayah dan ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orang tua (masyarakat Parental). Begitu pula halnya macam harta dan asal usul harta warisan itu, mempengaruhi kedudukan pewaris pada saat ia sudah meninggal dunia, apakah harta warisan itu sudah merupakan harta bersama ataukah masih bersifat harta pusaka atau harta bawaan. Jika harta warisan sudah merupakan harta bersama, sebagai harta pencaharian suami dan isteri, maka harta warisan itu bebas dari pengaruh hubungan kekerabatan.

b. Harta Warisan (Peninggalan).¹⁹

Merupakan objek dalam hukum waris adat, yaitu harta kekayaan yang akan diteruskan oleh pewaris ketika ia masih hidup atau setelah ia meninggal dunia, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris menurut sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Jenis-jenis harta warisan adalah :

b.1.Kedudukan/Jabatan Adat.

Merupakan warisan yang tidak berwujud benda, dan hal ini bersifat turun temurun. Misalnya : raja-raja adat batak, penghulu suku, penghulu andiko atau mamak kepala waris di Minang Kabau; dan lain-lain.

Pada masyarakat patrilineal pada umumnya warisan kedudukan/jabatan adat ini dipegang oleh keturunan laki-laki sulung (tertua), kecuali apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, maka kedudukan kepala adat diwarisi oleh penggantinya oleh keturunan kedua. Pewaris/jabatan adat tersebut di Batak tidak boleh diteruskan kepada anak perempuan.

Pada masyarakat matrilineal pada umumnya warisan/jabatan adat ini dipegang oleh saudara laki-laki sulung atau yang cakap dari seketurunan wanita dari pewaris. Yang masuk dalam warisan kedudukan/jabatan adat adalah hak-hak dan kewajiban sebagai anggota dewan tua-tua adat yang mempertahankan tata tertib adat, mengatur acara dan upacara adat, penggunaan alat-alat

¹⁹ Ibid, Hal.36-43.

perlengkapan dan bangunan adat; hak-hak dan kewajiban sebagai pemimpin kesatuan anggota kerabat seketurunan.

b.2.Harta Pusaka.

Dapat dibedakan menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, bila diukur atau dilihat dari asal usul harta tersebut, yaitu :

- Harta Pusaka Tinggi.

Semua harta berwujud benda, benda tidak bergerak seperti bangunan dan tanah; benda bergerak seperti alat perlengkapan pakaian adat dan perhiasan adat, alat senjata, alat-alat pertanian, perikanan, peternakan, jimat dan yang tidak berwujud benda seperti ilmu-ilmu gaib, amanat atau pesan tidak tertulis, semua berasal dari beberapa generasi menurut garis keturunan keatas, dari zaman nenek moyang dan paling rendah dari zaman buyut/canggah.

- Harta Pusaka Rendah.

Semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari mata pencaharian jerih payah kakek/nenek atau ayah/ibu, dan kebanyakan juga sudah tidak lagi terletak dikampung halaman atau sudah diluar kampung halaman yang sudah jauh atau diperantauan.

b.3. Harta Bawaan.

Semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami atau bawaan isteri ketika melangsungkan perkawinan. Jenisnya dapat berupa barang tidak bergerak atau barang bergerak, mungkin berasal dari barang harta pusaka

atau warisan dari orang tua atau dari kerabat masing-masing suami atau isteri, bisa juga berasal dari pemberian atau hibah dari anggota kerabat, tetangga, sahabat, atau berupa hibah wasiat, termasuk hak-hak pakai dan hutang piutang lainnya yang dibawa oleh masing-masing suami atau isteri ke dalam perkawinan mereka.

Pada masyarakat patrilineal yang melaksanakan perkawinan jujur, isteri ikut dan tunduk pada hukum kekerabatan suaminya. Maka yang disebut harta bawaan adalah barang-barang yang dibawa oleh isteri, sedangkan barang-barang yang dikuasai suami dan dimilikinya adalah harta penunggu atau harta penantian suami.

b.4. Harta Pencapaian

Semua harta warisan yang berasal dari jerih payah suami dan isteri secara bersama-sama dalam ikatan perkawinan mereka, yang termasuk dalam harta pencapaian, bukan saja dalam arti hasil bekerja sama dalam pertanian, hasil kerja sama berdagang atau karena suami menjadi karyawan dan isteri juga karyawan, tetapi juga termasuk pekerjaan isteri yang sehari-hari di rumah mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.

C. Ahli Waris²⁰

Semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan

²⁰ Ibid, Hal.63-144.

harta warisan, baik berupa barang berwujud benda, seperti kedudukan (jabatan) dan tanggung jawab adat, menurut susunan kemasyarakatan dan tata tertib adat yang bersangkutan. Selain itu tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan yang patrilineal, matrilineal, atau parental; sistem perkawinan yang berbentuk dengan pembayaran uang jujur (patrilokal) atau tanpa pembayaran uang jujur (matrilokal) atau perkawinan mandiri; sistem pewarisan yang individual, kolektif atau mayorat; jenis dan macam dari harta warisan; letak tempat harta warisan itu berada, serta kedudukan dari para ahli waris itu sendiri.

c.1. Ahli waris dalam masyarakat patrilineal

Pada dasarnya ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan ahli waris. Perempuan dimungkinkan jadi ahli waris, karena ia sebagai janda dari almarhum pewaris yang menggunakan hak pakainya atas harta peninggalan suaminya; atau karena ia sebagai anak perempuan yang diberi kedudukan sebagai anak laki-laki (pengganti) dengan melakukan perkawinan "ambil pria".

- Anak laki-laki sulung

Di Batak, anak laki-laki sulung menguasai harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi yang diurus bersama anggota keluarga seketurunan ayahnya. Akan tetapi jika anak sulung tersebut pergi merantau atau tidak bersedia mengurusnya, maka yang berkewajiban mengurusnya adalah anak laki-laki bungsu.

- Anak laki-laki bukan sulung dan anak laki-laki bungsu

Anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah dari orang tuanya, baik menurut adat maupun menurut agama yang dianut masyarakat setempat. Anak laki-laki tersebut termasuk keturunannya (cucu si pewaris).

- Anak perempuan

Pada dasarnya dikalangan masyarakat patrilineal anak perempuan bukan ahli waris, kecuali menurut hukum adat setempat dibolehkan anak perempuan sebagai pengganti kedudukan anak laki-laki karena keluarga yang bersangkutan putus keturunan (tidak mempunyai anak laki-laki).

Anak perempuan bisa mendapat bagian dari warisan ayahnya, bila pada saat ia melakukan perkawinan, ia diberi bekal harta bawaan, yang berupa perhiasan, alat transportasi (mobil atau motor) atau tanah atau misalnya di Batak, diberikan tanah *Pauseang* oleh ayahnya, yang mendapatkan hak pakai atau hak menikmati tanah tersebut.

- Anak tidak sah

Anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah pada dasarnya bukan ahli waris, namun sah atau tidaknya seorang anak dikalangan masyarakat adat patrilineal dipengaruhi oleh hukum adat setempat. Di Batak sah atau tidaknya seorang anak sebagai ahli waris dipengaruhi oleh adat Batak dan agama yang dianut, yaitu Kristen dan Islam.

- Anak angkat

Merupakan anak orang lain yang berasal terutama dari anggota kerabat terdekat atau juga orang lain yang bukan anggota kerabat, yang diangkat sebagai anak.

Di lingkungan masyarakat Batak Karo, kedudukan anak angkat sebagai ahli waris sama haknya dengan anak kandung terhadap harta pencaharian orang tua angkatnya, akan tetapi ia tidak berhak sebagai ahli waris terhadap harta pusaka dan kedudukan/jabatan adat.

- Anak Tiri

Anak yang lahir dari isteri yang sebelumnya berstatus janda, yang sudah mempunyai anak pada perkawinannya yang terdahulu dan kemudian menikah lagi dengan membawa anak kedalam perkawinannya yang selanjutnya.

Pada umumnya di Batak, Lampung dan daerah lainnya anak tiri tersebut bukanlah merupakan ahli waris dari bapak tirinya, ia tetap sebagai ahli waris bapak kandungnya, kecuali ia diangkat sebagai anak angkat oleh bapak tirinya, maka ia berhak sebagai ahli waris bapak tirinya.

- Ahli waris dengan hibah wasiat

Dimana seseorang yang tidak berhak mewaris atau yang tidak mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan untuk mendapatkannya karena adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup. Di lingkungan masyarakat patrilineal, hal ini dapat terjadi

terhadap isteri dan atau anaknya yang keturunannya rendah, atau juga terhadap anak angkat dan anak akuan.

Pesan atau amanat dalam hibah wasiat ini dapat dibuat dengan tertulis atau hanya diucapkan oleh pewaris kepada ahli waris yang ditentukannya, dengan disaksikan oleh beberapa anggota keluarga, terutama para ahli waris yang lain.

Di daerah Batak Angkola, Mandailing dan Padang lawas, pesan (tona) terakhir tentang pewarisan dari pewaris kepada ahli warisnya, dilakukan secara lisan atau tertulis pada saat pewaris tersebut masih hidup.

- Janda

Pada umumnya dilingkungan masyarakat adat patrilineal dengan melakukan perkawinan jujur, isteri/janda yang ditinggal suaminya wafat, bukan ahli waris dari almarhum suaminya, tetapi selama janda tersebut mematuhi adat dipihak keluarga suami dan bertempat tinggal dikediaman/tempat pihak keluarga suaminya, ia tetap berhak mengurus, memelihara, mengusahakan dan menikmati harta warisan suaminya, yang bukan dalam bentuk kedudukan/jabatan adat, untuk keperluan hidup janda tersebut dan anak-anak dari almarhum suaminya, dan kemudian harta warisan tersebut akan diteruskan/dialihkan kepada anak laki-laknya. Bila anak-anaknya belum dewasa, dalam hal pengurusan harta warisan tersebut, janda tersebut didampingi oleh saudara tertua dari almarhum suaminya atau penggantinya yang masih hidup. Dan apabila kehidupan janda tersebut

susah, karena tidak adanya harta warisan suaminya tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, maka ia diurus dan dipelihara oleh saudara-saudara almarhum suaminya sampai anaknya dapat berdiri sendiri atau sampai janda tersebut meninggal dunia.

c.2. Ahli waris dalam masyarakat matrilineal

Pada dasarnya ahli waris adalah anak-anak perempuan, sedangkan anak laki-laki bukan ahli waris. Kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat matrilineal berbeda dengan kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam masyarakat patrilineal. Jadi para ahli waris perempuan dalam menguasai dan mengatur harta warisan tidak sendiri, melainkan didampingi oleh saudara laki-lakinya.

- Anak perempuan sulung

Seperti yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo di Sumatera Selatan yang menganut sistem pewarisan mayorat wanita. Anak perempuan sulung berkedudukan sebagai “Tunggu Tubang” (penunggu harta) dari semua harta warisan orang tuanya, yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya kepada ahli waris anak perempuan lain. Di dalam menguasai dan mengatur harta warisan ini, ia didampingi oleh saudara laki-lakinya yang tertua yang disebut “Payung Jurai” (pelindung keturunan), fungsinya yang utama adalah sebagai pengganti dari ibunya yang sudah tua atau sudah meninggal

dunia, untuk mengurus dan memelihara adik-adiknya laki-laki dan perempuan sampai mereka dewasa dan berumah tangga.

- Anak perempuan yang bukan sulung

Seperti yang berlaku di Minang Kabau yang menganut sistem pewarisan kolektif wanita terhadap harta pusaka, maka semua anak perempuan yang bertali darah adalah ahli waris dari harta pusaka seketurunannya yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, tetapi dikuasai dan diatur oleh "Mamak Kepala Waris". Para ahli waris perempuan, boleh mengusahakan, menggunakan dan menikmati harta pusaka, seperti tanah sawah pusaka atau rumah gadang, secara bersama-sama dibawah pengawasan "Mamak Kepala Waris".

- Anak laki-laki

Anak laki-laki mempunyai kemungkinan berkedudukan sebagai ahli waris, apabila salah satu dari mereka yang ditetapkan sebagai waris dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak perempuan, jadi kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dengan melaksanakan perkawinan ambil perempuan.

Menurut Ter Haar, perkawinan seperti ini pernah terjadi di perbatasan antara Minang Kabau dan Daerah Mandailing (Tapanuli Selatan) dimana suatu keluarga Minang yang tidak mempunyai keturunan anak perempuan melaksanakan perkawinan jujur dan mengambil gadis Mandailing dan menetapkan anak perempuan yang akan lahir dari

perkawinan ini menjadi ahli waris bagi keluarga yang putus keturunan perempuan itu.

c.3. Ahli waris dalam masyarakat parental

Pada dasarnya ahli waris tidak dibedakan antara kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan, mereka masing-masing berhak mendapat bagian warisan dari orang tuanya, baik terhadap harta warisan yang tergolong harta pusaka keturunan, maupun yang berasal dari harta bawaan ayah atau ibunya, ataupun harta pencaharian (harta bersama) orang tua semasa hidup mereka.

Oleh karena itu, cenderung dilakukan sistem pewarisan secara individual, dimana harta warisan tersebut terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Sistem parental/bilateral ini, banyak dianut oleh masyarakat adat Aceh, Melayu (Sumatera Utara), Sumatera Selatan, Pulau Jawa dan Madura, Kalimantan dan Sulawesi. Bahkan karena adanya perkembangan jaman yang semakin modern, sistem parental/bilateral sudah dianut oleh banyak keluarga-keluarga lainnya, yang berlatar belakang kemasyarakatan patrilineal atau matrilineal.

D. Pelaksanaan / Proses Pembagian Warisan

Proses pembagian warisan dapat dilaksanakan pada saat : ²¹

²¹ Ibid, Hal.95-105.

1. Sebelum pewaris meninggal dunia (masih hidup)

a. Cara penerusan atau pengalihan.

Pada saat pewaris masih^{hidup} seringkali pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban harta kekayaan kepada ahli warisnya. Cara ini biasanya berlangsung menurut adat setempat. Misalnya terhadap kedudukan, hak dan kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi kepada anak laki-laki sulung atau bungsu di Tanah Batak atau kepada anak perempuan sulung di Minang Kabau, atau kepada tunggutu-tubang di Semendo.

Ada pula pemberian, harta kekayaan tertentu sebagai bekal kekayaan untuk kelanjutan yang diberikan oleh pewaris kepada anak-anaknya pada saat anaknya akan kawin dan mendirikan rumah tangga baru, di Batak disebut Manjae. Pemberian itu dapat berbentuk rumah, tanah, sawah, mobil dan perhiasan. Di Batak biasanya untuk anak laki-laki diberikan bekal rumah atau tanah, dan untuk anak perempuan diberikan bekal perhiasan.

b. Cara penunjukan.

Pada saat pewaris masih hidup, ia menunjuk kepada ahli waris atas hak dan kewajiban atas harta tertentu, dimana perpindahan penguasaan dan pemilikan berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli warisnya pada saat si pewaris sudah meninggal dunia.

c. Cara meninggalkan pesan atau wasiat.

Biasanya pesan atau wasiat ini diucapkan atau dituliskan pada saat pewaris masih hidup akan tetapi dalam keadaan sakit parah atau akan pergi jauh dan ada kemungkinan tidak kembali lagi ke kampung halamannya. Hal ini biasanya harus diucapkan atau dituliskan dengan terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua desa (pamong desa).

2. Setelah pewaris meninggal dunia

Setelah si pewaris meninggal dunia, terkadang timbul persoalan apakah harta warisannya diteruskan kepada ahli warisnya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi. Bila harta warisan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi maka perlu ditentukan harta warisan tersebut berada dalam penguasaan, sebagai berikut :

a. Penguasaan Janda

Pada umumnya di Indonesia apabila pewaris meninggal dunia meninggalkan isteri dan anak-anak, maka harta warisan, terutama harta bersama suami dan isteri yang didapat sebagai hasil pencaharian bersama selama perkawinan mereka, dapat dikuasai oleh janda almarhum, untuk kepentingan kelanjutan hidup janda dan anak-anak yang ditinggalkan.

b. Penguasaan Anak

Apabila janda dari almarhum pewaris sudah tua dan anak-anak sudah dewasa dan berumah tangga, maka harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut dikuasai dan diatur oleh salah satu anak-anak tersebut

yang dianggap cukup cakap dalam mengurus dan mengatur harta warisan tersebut.

c. Penguasaan Anggota Keluarga

Apabila pewaris meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan belum dewasa, serta tidak ada jandanya dapat bertanggung jawab mengurus harta warisan, maka penguasaan atas harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut diberikan kepada orang tua pewaris, bila sudah tidak ada lagi, maka akan dikuasai oleh saudara-saudara pewaris yang seketurunan atau dari kerabatnya yang paling dekat.

d. Penguasaan Tua-tua Adat

Apabila harta warisan tersebut adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi, misalnya keris pusaka, tombak, pedang, jimat dan lain-lain.

Bila harta warisan diteruskan dalam keadaan terbagi-bagi, maka perlu ditentukan kapankah waktu pembagiannya dan bagaimana cara pembagian itu akan dilaksanakan, sebagai berikut :

a. Waktu Pembagian

Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktunya harta warisan tersebut akan dibagi, akan tetapi menurut adat kebiasaan waktu pembagian warisan biasanya dilakukan setelah upacara selamatan terhadap pewaris yang meninggal dilakukan.

b. Juru Bagi, biasanya anggota keluarga/kerabat, yaitu :

- Orang tua yang masih hidup.

- Janda atau duda pewaris.
- Anak laki-laki atau perempuan tertua.
- Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana.
- Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat atau pemuka agama yang diminta, ditunjuk atau dipilih oleh para ahli waris.

c. Cara Pembagian

Dalam hukum adat biasanya didasarkan atas pertimbangan tertentu mengingat wujud benda dan kebutuhan dari para ahli waris yang bersangkutan.

E. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN DALAM HUKUM WARIS

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam hukum waris adalah, antara lain :

a. Faktor Pendidikan ²²

Pendidikan membawa akibat, manusia menjadi lebih rasional dari sebelumnya, jadi lebih banyak memakai logika dan perhitungan, mempertimbangkan segi-segi negatif dari sesuatu hal, kejadian atau tindakan yang akan dilakukan apakah sesuatu yang bermanfaat atau tidak, sehingga berkuranglah sifat berpikir spekulatif atau menyerah pada keadaan. Hal ini berpengaruh khususnya dalam waris adat batak, yang dulunya hanya anak laki-laki yang berhak mendapat warisan (sistem patrilineal), maka secara berpikir dengan logika, seseorang akan

²² Bushar Muhammad, Op-Cit, Hal.128.

lebih cenderung memilih keadilan dalam hal pembagian harta warisan, maka bagian warisan kepada anak laki-laki dan perempuan adalah sama.

b. Faktor Perantauan

Adanya perpindahan penduduk atau orang-orang dari daerah terpencil ke tempat-tempat yang lebih terjamin kehidupan baginya. Maka ia akan meninggalkan sifat hidup yang kiranya kurang baik dari daerah asalnya (kampungan halamannya), serta beralih ke sifat hidup yang lebih baik di daerah perantauan. Pengaruhnya bagi hukum waris, misalnya di daerah asal, hukum warisnya berdasarkan sistem patrilineal, sedangkan di daerah perantauan hukum warisnya berdasarkan sistem parental, maka ia akan cenderung mengikuti sistem di daerah perantauan, yaitu hukum waris berdasarkan sistem parental.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dalam arti luas termasuk pula didalamnya faktor industrialisasi. Pada hakekatnya erat pula hubungannya dengan perkembangan di lapangan teknologi dan perkembangan kota-kota besar, semua menunjukkan dan membawa tenaga-tenaga di dalam masyarakat dan alam, sama-sama menuju kepada suasana susunan ekonomi yang melipat gandakan hasil produksi di segala lapangan. Semua mempengaruhi tata hubungan manusia dalam masyarakat, yaitu lebih rasional, berdasarkan perhitungan untung dan rugi.

d. Faktor Revolusi dan Perang

Revolusi adalah suatu perubahan besar dan mendalam pada masyarakat, yang berlangsung dalam tempo yang sangat cepat, yang membawa akibat perubahan

kepada cara-cara hidup lama, cara bertempat tinggal, kebiasaan, lalu lintas dan lain-lain, lebih-lebih membawa perubahan dalam sikap mental dan rohani, sehingga kemudian timbul persamaan derajat antara laki-laki dan perubahan (bilateral).

e. Yurisprudensi²³

Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa harta warisan, pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki penyelesaian yang rukun dan damai, tidak saja terbatas pada pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota almarhum pewaris. Harapannya adalah perselisihan tersebut berhasil diselesaikan secara damai, sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan keluarga itu, dapat dikembalikan menjadi utuh seperti sedia kala. Jalan penyelesaian itu dapat ditempuh dengan cara musyawarah, baik musyawarah terbatas dalam lingkungan anggota keluarga sendiri atau musyawarah kerabat atau jika dipandang perlu dimusyawarahkan dalam musyawarah perdamaian adat yang disaksikan oleh tua-tua adat. Apabila segala usaha dalam menempuh jalan damai di muka keluarga, kerabat dan peradilan adat mengalami kegagalan, maka barulah kemudian perkaranya dibawa ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Maka hal ini akan menjadi tugas bagi hakim Pengadilan Negeri, hakim

²³ M. Rasyid Ariman, "Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi", Ghalia Indonesia, Jakarta 1988, Hal.24-38.

Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung, untuk mencari solusi yang tepat bagi sengketa warisan adat tersebut.

Salah satu yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkenal dalam sengketa warisan adat adalah : Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Oktober 1961 No. 179 K/Sip/1961, yang berbunyi : Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, begitu pula di Tanah Batak Karo, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang pewaris, bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

Dengan adanya yurisprudensi tersebut diatas, maka dikemudian hari, bila terjadi sengketa warisan, maka pihak yang merasa dirugikan, terutama pihak perempuan, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dan penyelesaiannya oleh hakim dapat merujuk kepada yurisprudensi ini, yaitu pembagian hak waris yang sama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam setiap penelitian terhadap suatu ilmu, metode penelitiannya harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi dasarnya. Misalnya metode penelitian terhadap ilmu-ilmu pasti, berbeda dengan metode penelitian terhadap ilmu sosial. Oleh karena itu maka suatu penelitian hukum akan mempunyai suatu ciri-ciri yang khas bila dibandingkan dengan bidang ilmu lainnya.

Penelitian Hukum, menurut Ronny Hanitijo Soemitro dapat dibedakan menjadi :²⁴

Penelitian Hukum Normatif, yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga Hukum Kepustakaan. Serta penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris meneliti dengan menggunakan data primer.

A. Metode Pendekatan

Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai adanya kaitan antara faktor yuridis terhadap faktor empiris mengenai "Pemberian Hibah Dan Hibah Wasiat Kepada Anak Perempuan Sebagai Penerobosan Dalam Mendapatkan Harta Dari

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri", Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, Hal.9.

Pewaris Di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon”, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini untuk memberikan deskripsi mengenai “Pemberian Hibah Dan Hibah Wasiat Kepada Anak Perempuan Sebagai Penerobosan Dalam Mendapatkan Harta Dari Pewaris Di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon”. Selain itu juga dilakukan analisis baik dari aspek yuridis maupun aspek empirisnya.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di daerah Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dan sekitarnya. Penulis memilih lokasi penelitian di lokasi ini, karena di daerah ini terdapat banyak masyarakat atau orang-orang suku Batak yang masih memegang teguh adat istiadat khususnya adat Batak. Selain itu, penulis sebagai salah satu dari masyarakat suku Batak, Parapat merupakan kampung halaman dan tempat tinggal sanak keluarga.

D. Populasi dan Teknik Sampling.

Populasi atau Universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.²⁵ Populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu.

²⁵ Ibid, Hal.44.

Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi tersebut, maka cukup populasi di dalam penelitian ini adalah masyarakat atau orang-orang Batak yang bertempat tinggal di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon. Mengingat banyaknya populasi pada masyarakat atau orang-orang Batak yang tinggal di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon maka perlu dicari sampelnya.

Penulis dalam menentukan sampel menggunakan teknik sampling, yaitu teknik yang biasa dipakai karena alasan biaya, waktu dan tenaga, maka tidak mengambil sejumlah besar sampel.

Menurut Mardalis dalam bukunya mengemukakan bahwa,²⁶ "Penggunaan Teknik Purposive Sampel mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan pada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah di dapat dari populasi sebelumnya".

Maka cara pengambilan sampel dilakukan dengan mengadakan penelitian pada masyarakat atau orang-orang Batak yang bertempat tinggal di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dan sekitarnya. Adapun yang menjadi sampel/responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁶ Mardalis, "Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal", Bumi Aksara, Jakarta 1989, Hal.58.

4. Satu orang Sintua (anggota majelis jemaat) HKBP Parapat, sebagai pemuka agama.
5. Satu orang pemuka adat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dan data sekunder dapat diperoleh melalui tata kerja sebagai berikut :

1. Data Primer.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara :

- a. Mengadakan wawancara terstruktur, kepada para responden khususnya yang menyangkut tentang hukum waris adat Batak yang berlaku di jaman dahulu, hingga sampai pada perkembangan di jaman sekarang ini.
- b. Mengadakan observasi, yaitu melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung ke obyeknya.

2. Data Sekunder.

Data sekunder diperoleh dengan cara :

- a. Melakukan studi kepustakaan, yaitu mempelajari sejumlah literatur yang ada khususnya mengenai hukum waris adat, serta hasil perkuliahan selama mengikuti pendidikan.
- b. Menelusuri dan melakukan analisa terhadap berbagai dokumen yang menyangkut ketentuan-ketentuan hukum waris adat Batak, juga terhadap yurisprudensi-yurisprudensi yang ada yang berkaitan dengan hukum waris adat Batak.

- b. Menelusuri dan melakukan analisa terhadap berbagai dokumen yang menyangkut ketentuan-ketentuan hukum waris adat Batak, juga terhadap yurisprudensi-yurisprudensi yang ada yang berkaitan dengan hukum waris adat Batak.

F. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data Primer dan data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data yang mendasari serta mendukung peneliti untuk mengamati dan menganalisa permasalahan secara lebih objektif.

- a. Data Primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan tujuan mendapatkan informasi berupa pendapat-pendapat atau penelitian-penelitian dari responden mengenai Pemberian Hibah Dan Hibah Wasiat Kepada Anak Perempuan Sebagai Penerobosan Dalam Mendapatkan Harta Dari Pewaris.
- b. Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh data-data yang bersifat teoritis seperti pendapat, pandangan, asas-asas hukum mengenai Hukum Adat khususnya Hukum Adat Batak.

G. Analisa Data

Setelah terkumpul baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisa secara kualitatif mengingat data yang terkumpul bersifat deskriptif. Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan diatas, maka analisis kualitatif ini berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku sejak dahulu, beserta kaitannya dengan peraturan yang berlaku sekarang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. Sejarah Masyarakat Batak Dan Gambaran Singkat Lokasi Penelitian

1. Sejarah masyarakat batak

Yang disebut wilayah Tanah Batak atau Tano Batak, ialah daerah hunian sekeliling Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara. Seandainya tidak mengikuti pembagian daerah oleh Belanda sebagaimana diikuti sekarang, Tano Batak masih sampai di Aceh Selatan dan Aceh Tenggara, (kini disebut Gayo dan Alas), beberapa lema bahasanya mirip dengan lema bahasa Batak, demikian juga nama si Gayo dan si Alas ada dalam legenda/tarombo Batak.²⁷

Menurut sejarah nenek moyang suku bangsa Batak pada mulanya berdiam disekitar Danau Toba. Perkampungan leluhur mereka (Siraja Batak) adalah Sianjur Mula-Mula, di kaki gunung Pusuk Bukit, tidak jauh dari kota Pangururan sekarang.²⁸ Dari tempat inilah keturunannya menyebar, mula-mula kedaerah sekitarnya dan lambat laun keseluruh penjuru Tanah Batak. Selama beberapa abad lamanya, pergaulan mereka dengan suku-suku bangsa Indonesia lainnya sangat terbatas,

²⁷ Gens.G.Malau (Ompu Linggom BAT.Pagar Lobak), "Aneka Ragam Ilmu Pengetahuan Budaya Batak", Penerbit Yayasan Bina Budaya Nusantara Tao Toba Nusan Budaya, Jakarta 2000, Hal.30.

²⁸ O.H.S.Puba dan Elvis F.Purba, "Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak)", Penerbit Monora, Medan 1997, Hal.1.

bangsa Batak tersebut.

Orang Batak tidak pernah mengatakan dirinya dengan kata suku Batak, akan tetapi selalu mengatakan bahwa dirinya adalah Bangsa Batak. Hal ini dikarenakan orang Batak mempunyai daerah, yang disebut Tano Batak, Bahasa Batak, Tulisan atau Huruf Batak, serta Budaya Batak yang mempunyai ciri khas tersendiri yang dapat terlihat diantara sekian banyaknya suku bangsa yang ada di Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan Adat Batak adalah norma, aturan atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa/pemimpin dalam suku Batak untuk mengatur kehidupan atau kegiatan sehari-hari orang Batak di kampungnya dan di dalam keluarga besar orang Batak. Dapat dikatakan bahwa semua orang Batak bersaudara, karena Bangsa Batak berasal dari satu nenek moyang yang menurunkan orang Batak.

Pemimpin Adat Batak biasanya disebut sebagai Mangaraja Adat yaitu yang diangkat dan diberi gelar Mangaraja yang disandangnya seumur hidup, hal ini dikarenakan orang tersebut mengetahui seluk beluk aturan, norma, ketentuan, dan hukum yang berlaku dalam Adat Batak. Pemimpin adat bukan berarti yang mempunyai kuasa dalam adat, akan tetapi fungsinya adalah memberitahu, mengarahkan bagaimana melaksanakan satu adat tertentu, bentuknya, jenis dan sifatnya dan siapa saja yang terlibat dalam lingkaran adat tersebut. Oleh karena itu seorang Mangaraja harus menjadi panutan dan menjadi guru adat di dalam masyarakat di daerahnya.

Dewasa ini kita bisa mengenal masyarakat Batak yang terdiri dari : ²⁹

1. Batak Toba, menghuni Tapanuli Utara+Tapanuli Tengah/ Selatan.
2. Batak Simalungun, menghuni bagian timur Tao Toba.
3. Batak Karo, menghuni Kabupaten Karo, Langkat+Aceh.
4. Batak Pakpak (Dairi), menghuni Kabupaten Dairi+Aceh Selatan.
5. Batak Pesisir, menghuni pantai barat, antara Natal ke Singkil.
6. Batak Angkola (Angkola Jae dan Julu) sipirok-Padang Sidempuan.
7. Batak Mandailing, menghuni wilayah Pakantan+Muara Sipongi.
8. Batak Padang Lawas, Sibuhuan, A.Godang, Rambe+Harahap.
9. Batak Melayu, masyarakat melebur ke Melayu pesisir timur.
10. Batak Nias, menghuni Pulau Nias dan sekitarnya.
11. Batak Alas-Gayo, menghuni Aceh Selatan+Tengah.

Bahasa Batak menurut logatnya dibagi atas 5 (lima) macam sesuai dengan daerah yang menggunakannya, yaitu : ³⁰

1. Bahasa Batak Pakpak.
2. Bahasa Batak Karo.
3. Bahasa Batak Simalungun.
4. Bahasa Batak Toba.
5. Bahasa Batak Angkola.

²⁹ Gens.G.Malau (Ompu Linggom BAT.Pagar Lobak), Op-Cit, Hal.31.

³⁰ Sabam Huldrick Wesley Sianipar DL (Ompu Ugani), "Tuho Parngoluan Dalihan Natolu (Sistem Bermasyarakat Bangsa Batak)", CV.Pustaka Gama, Medan 1991, Hal.81.

Terjadinya 5 (lima) macam Bahasa Batak tersebut karena pengaruh dari daerah dan para orang pendatang, disamping juga adanya pengaruh dari bahasa asing.

Orang Batak tidak mengenal gotong royong seperti yang terdapat pada beberapa suku lain di Indonesia. Gotong royong pada orang Batak adalah dalam bentuk kebersamaan yang artinya saling membantu dalam hal tertentu yang harus dibayar dengan bantuan pada saat tertentu lainnya. Hal ini dapat dilihat misalnya jika keluarga si A mengadakan upacara/pesta perkawinan salah satu anggota keluarganya, pada saat itu juga keluarga B yang merupakan tetangga turut memberikan bantuan kepada keluarga A, agar pesta tersebut dapat terselenggara dengan sukses. Maka dilain kesempatan apabila dikemudian hari misalnya keluarga B tersebut melakukan upacara/pesta perkawinan salah satu anggota keluarganya, maka keluarga A sebagai tetangganya harus ikut pula memberikan bantuannya, sebagai balasan. Sedangkan gotong royong pada masyarakat lain di Indonesia adalah kebersamaan dalam menyelesaikan/mengerjakan sesuatu tanpa bayaran atau memberi bantuan untuk mengurangi kesulitan orang lain.

Propinsi Sumatera Utara, daerah asal masyarakat Suku Batak, terdiri dari daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Daerah pantai terletak sepanjang pesisir timur dan barat dan bersambung dengan dataran rendah terutama dibagian timurnya. Dataran Karo, Toba dan Humbang merupakan Dataran Tinggi. Sedangkan Bukit Barisan yang membujur di tengah-tengah dari utara keselatan merupakan pegunungan, sebagai tulang punggung propinsi ini, dengan celah-celah berupa lembah-lembah di sekitar Silindung dan Padang Sidempuan.

Danau Toba yang mengelilingi Pulau Samosir berada di bagian tengah, merupakan daerah wisata alam yang indah dan terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, Propinsi Sumatera Utara memiliki banyak gunung, sungai dan pulau, diantaranya terdapat gunung berapi seperti Sibayak, Sinabung dan Martimbang. Sungai-sungai yang besar adalah Sungai Asahan, Wampu, Batang Serangan, Kualuh, Bilah, Baruman, Batang Toru dan Batang Gadis. Diantara pulau-pulaunya yang besar adalah pulau Nias yang memiliki sisa-sisa budaya peninggalan jaman megalitik, misalnya ada monumen batu dan upacara pengurbanan dengan hewan babi. Adapula jeram-jeram di bagian hulu Sungai Asahan, yaitu jeram Sigura-gura dan Sampuran Harimau memiliki potensi pembangkit tenaga listrik.

Di dalam bidang kesenian/kerajinan, yang paling terkenal adalah Ulos, yang berupa kain yang ditenun dari bahan benang, kapas atau rami. Ulos merupakan kelengkapan pakaian khas adat Batak. Biasanya warna dasar ulos hitam kecoklatan atau putih (Batak Dairi dan Simalungun), biru tua dan kemerahan (Batak Karo) dan kain ulos penuh warna warni (di Sipirok, Tapanuli Selatan). Ada bermacam-macam pula jenis Ulos, dengan fungsinya yang berbeda-beda, misalnya untuk digunakan pada upacara pernikahan, kelahiran, dan kematian.

2. Gambaran singkat lokasi penelitian

Kecamatan Girsang Sipangan Bolon terletak di Kabupaten Simalungun dan berjarak lebih kurang sekitar 177 kilometer dari kota Medan. Sedangkan pusat pemerintahan daerahnya adalah Parapat yang merupakan salah satu kota pariwisata

yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara karena letak kota Parapat dikelilingi oleh Danau Toba yang merupakan salah satu Danau yang terbesar di Indonesia.

Adapun mayoritas penduduknya adalah suku batak toba yang menganut agama kristen, baik kristen protestan maupun kristen katolik. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon berpenduduk lebih kurang 14.308 jiwa adalah Warga Negara Indonesia Pribumi dan 61 jiwa Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pedagang, petani.

Kecamatan Girsang Sipangan Bolon terdiri dari tiga kelurahan, yaitu : Kelurahan Parapat, yang berpenduduk 6.135 jiwa, Kelurahan Tiga Raja, yang berpenduduk 2.415 jiwa, dan Kelurahan Girsang, yang berpenduduk 2.159 jiwa, serta dua desa/nagori, yaitu : Desa/Nagori Sibaganding, yang berpenduduk 1.562 dan Desa/Nagori Sipangan Bolon, yang berpenduduk 2.037 jiwa.

B. Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Batak di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon

1. Sistem pewarisan dalam masyarakat hukum adat batak dan perkembangannya.

Hasil Penelitian

Sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan setempat, di tanah batak terdapat struktur kemasyarakatan yang patrilineal, yaitu masyarakat yang berdasarkan hubungan darah yang ditarik melalui garis keturunan laki-laki sehingga yang berhak meneruskan garis keturunan hanyalah anak/keturunan laki-

laki sedangkan anak perempuan yang sudah menikah akan keluar dari kekerabatan patrilineal dari keluarganya dan kemudian masuk kedalam kekerabatan patrilineal suaminya.

Analisa

Mengenai sistem pewarisan, berkaitan erat pula dengan hukum keluarga dan hukum perkawinan. Hukum Keluarga Adat adalah hukum adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat pengaturan mengenai hubungan hukum atau kekerabatan apa yang terdapat diantara satu individu dengan individu lainnya, apakah hubungan ayah dan anak, ibu dan anak, kakek dan cucu, dan sebagainya.

Dalam masyarakat batak, sistem perkawinan yang berlaku adalah sistem eksogami, yaitu perkawinan dimana seorang laki-laki harus mencari seorang perempuan (calon isteri) yang bukan semarga dengannya, karena dalam masyarakat adat batak perkawinan yang semarga sangat dilarang. Apabila terjadi perkawinan yang semarga maka biasanya pasangan suami isteri tersebut akan diusir dari kampungnya dan orang tua dari kedua pasangan suami isteri tersebut biasanya tidak lagi mengakui sebagai anaknya dan putus hubungan darah dengan orang tua.

Biasanya dalam masyarakat batak apabila seorang laki-laki ingin mencari calon isteri terlebih dahulu dia ditawarkan untuk memilih salah seorang anak perempuan dari pihak keluarga ibu dalam bahasa batak disebut dengan "Pariban", yaitu anak dari paman/tulang (saudara laki-laki dari pihak ibu).

Adapun bentuk perkawinan yang dilakukan dalam masyarakat batak, pada umumnya adalah “Bentuk Perkawinan Jujur” yaitu perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang jujur atau dalam istilah bataknya adalah “Sinamot”. Maka dengan diterimanya uang atau barang sebagai sinamot tersebut oleh pihak perempuan, maka berarti setelah perkawinan dilangsungkan, si perempuan akan beralih kedudukannya masuk dalam kekerabatan/keluarga suaminya, selama ia terikat dalam perkawinan tersebut atau menjadi isteri dari suaminya tersebut. Selain itu, si isteri wajib mengikatkan diri untuk berada di pihak keluarga suaminya, baik secara pribadi maupun berikut harta benda yang dibawanya masuk kedalam perkawinan tersebut, dan tunduk kepada hukum adat keluarga suaminya, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut harta bawaan isteri. Isteri dalam melakukan perbuatan hukum harus atas persetujuan suaminya atau kerabat suaminya.

Mengenai sinamot, adalah merupakan hak bagi keluarga/kerabat keluarga isteri, jadi bukanlah semata-mata hak milik isteri. Apabila dikemudian hari si suami meninggal dunia dan isteri menjadi janda, apabila si isteri tidak bersedia kawin lagi dengan saudara laki-laki suaminya yang telah wafat, karena si janda ingin kembali kerumah orang tua/keluarganya atau si janda ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, maka sinamot tersebut harus dikembalikan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki/suami yang telah meninggal dunia tersebut.

Hingga pada saat ini dalam perkawinannya, bentuk perkawinan jujur atau sinamot ini masih tetap terjadi dalam lingkungan masyarakat adat batak.

Setelah terikat perkawinan, maka kemudian sepasang suami isteri tersebut akan menjadi orang tua dan dari mereka kemudian akan mendapatkan keturunan atau lahir anak-anak. Orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, tidak hanya terbatas sampai sang anak kawin dan dapat mandiri, akan tetapi jika diperlukan walaupun mereka sudah menikah dan mandiri orang tua/kerabat keluarga dapat memberikan bimbingan dan pengawasannya.

Dalam masyarakat patrilineal di tanah batak, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak adalah ayah kandungnya atau semua keturunan laki-laki (kerabat) dari ayah kandungnya.

Hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap suku batak toba di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, menurut pendapat Bapak Tumpun Sinaga³¹ dahulu orang batak memang mengikuti sistem patrilineal dalam pembagian warisan, dimana yang mendapat bagian warisan pihak anak laki-laki atau anak laki-laki saja, sedangkan pihak perempuan atau anak perempuan tidak mendapat bagian warisan dari orang tuanya. Tetapi dalam perkembangannya yang terjadi pada saat ini di kecamatan Girsang Sipangan Bolon khususnya pihak perempuan atau anak perempuan bisa mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya. Pembagian warisan dengan hak yang sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan

³¹ Wawancara dengan Bapak Tumpun Sinaga, Ketua Perkumpulan Toga Sinaga, Boru Dohot Bere Parapat dan sekitarnya, Tanggal 23 Juni 2003.

perempuan sudah sering dilaksanakan, khususnya pada masyarakat batak toba di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.

Adanya perkembangan dalam pembagian warisan yang terjadi pada saat ini khususnya pada masyarakat batak toba di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon menurut pendapat Bapak Tumpun Sinaga, hal ini tidak terlepas dari falsafah orang batak yaitu “Dompak Marmeme Anak Sona Tundal Marmeme Boru” artinya pada waktu dahulu seorang ibu dalam memberikan makan kepada anaknya yang masih bayi dengan terlebih dahulu di kunyah (di meme). Dalam memberikan makan baik anak laki-laki maupun anak perempuan posisinya sama-sama di depan. Jadi kalau sama diberikan makan di depan kenapa anak perempuan tidak dapat harta warisan orang tuanya, kecuali memberikan makan anak perempuan posisinya di belakang. Dengan kata lain baik anak laki-laki maupun anak perempuan sebaiknya mendapatkan hak yang sama.

Dalam perkembangannya dengan adanya falsafah tersebut mempengaruhi cara berpikir masyarakat batak toba di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon khususnya para orang tua (pewaris). Sehingga dengan dasar falsafah tersebut para orang tua (pewaris) dalam hal membagikan harta warisannya pihak perempuan atau anak perempuan selalu mendapat bagian terhadap harta warisan.

Secara umum dalam hal pembagian warisan pada suku batak dilaksanakan dengan sistem pembagian secara individual, yaitu harta warisan dibagi-bagi pada masing-masing individu sebagai ahli waris dan untuk kemudian hari akan beralih pada penguasaan dan pengelolaan masing-masing individu ahli waris. Yang

sering terjadi adalah harta warisan peninggalan orang tua, misalnya barang tidak bergerak berupa tanah atau rumah semuanya dijual terlebih dahulu, dari hasil atau harga penjualan yang didapat baru kemudian harta warisan tersebut dibagi-bagi dalam bentuk uang tunai pada masing-masing individu ahli waris. Tetapi ada pula keluarga yang menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki dimana penguasaan dan pengelolaan terhadap harta warisan peninggalan orang tua diserahkan kepada anak laki-laki sulung. Menurut cerita responden Bapak Drs. Bona Sihotang³² hal ini pernah dialaminya sendiri dimana adik laki-lakinya sudah merantau atau tidak lagi tinggal di Sumatera Utara, harta warisan orang tua merupakan sebuah rumah dan tanah di Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon. Karena hanya dia yang tetap bertempat tinggal dikampung halaman sebagai anak laki-laki sulung, jadi dialah yang dipercayakan untuk menguasai dan mengelola rumah dan tanah warisan tersebut.

Berbeda dengan pengalaman dari responden Bapak Tumpun Sinaga, dimana dalam keluarganya menganut sistem pewarisan ~~Minora~~ laki-laki, dimana harta warisan peninggalan orang tuanya yang berupa sebidang sawah dan sebidang tanah di daerah Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon saat ini masih dikuasai dan dikelola olehnya sendiri sebagai anak laki-laki yang paling bungsu dari keluarganya, kemudian pendapatan/hasil dari bercocok tanam di sawah

³² Wawancara dengan Bapak Drs. Bona Sihotang, Sintua HKBP Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Tanggal 25 Juni 2003.

tersebut dibagi-bagikan dalam bentuk uang tunai kepada saudara-saudara kandungnya dengan pembagian sama rata anak laki-laki dan anak perempuan.

Analisa

Dilihat dari hasil penelitian yang ada, maka menurut pendapat penulis, sudah sepantasnyalah pada saat sekarang ini pembagian warisan secara waris adat batak dilaksanakan secara sama rata terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi tidak hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan warisan, karena dijamin sekarang ini peranan anak perempuan dalam kehidupan masyarakat sudah sedemikian luasnya, serta sudah adanya persamaan derajat antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

2. Unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris adat batak dan perkembangannya.

a. Pewaris

Hasil Penelitian

Pewaris adalah merupakan seseorang yang menyerahkan harta warisannya pada saat ia masih hidup atau pada saat ia sudah meninggal. Menurut pendapat responden bapak Tumpun Sinaga, dalam masyarakat suku batak yang disebut sebagai pewaris adalah orang tua laki-laki (ayah) yang berkedudukan sebagai pemilik dari harta warisan.

Seiring dengan perkembangan jaman, maka yang berkedudukan sebagai pewaris dalam adat batak, tidak hanya ayah tetapi juga ibu (orang tua), karena

yang umum dilakukan sekarang harta warisan dibagi-bagi pada saat kedua orang tua sudah meninggal dunia.

Analisa

Sistem yang dianut suku batak adalah sistem kemasyarakatan patrilineal oleh karena itu, biasanya yang dianggap sebagai pewaris hanyalah pihak ayah atau anak laki-laki sebagai kepala keluarga. Tetapi sekarang kita bisa lihat bahwa yang berkedudukan sebagai pewaris adalah kedua orang tua (ayah dan ibu), hal ini dikarenakan pihak perempuan atau isteri telah banyak berperan dalam menunjang ekonomi kehidupan keluarganya, dan penghasilan isteri masuk kedalam harta bersama atau harta persatuan suami isteri, maka harta bersama atau harta persatuan itu pulalah kelak yang akan diwarisi oleh anak-anaknya pada saat suami isteri tersebut sudah meninggal.

b. Harta Warisan

Hasil Penelitian

Mengenai jenis-jenis harta yang terdapat dalam hukum waris adat batak dapat diperinci antara lain :

- Harta bawaan

Harta bawaan adalah merupakan harta yang diperoleh dan dikuasai oleh suami/isteri masing-masing sebelum mereka menikah, dan kemudian harta tersebut dibawa masuk ke dalam perkawinan mereka, jadi ada istilah harta bawaan suami dan harta bawaan isteri.

Harta kekayaan yang dibawa oleh pihak laki-laki atau suami ke dalam perkawinan yang diperoleh sebagai pemberian dari orang tuanya, dan dianggap sebagai modal dalam kehidupan berumah tangganya, di adat batak disebut sebagai **“Harta Panjaean”**

Sedangkan harta kekayaan yang dibawa oleh pihak perempuan atau pihak isteri kedalam perkawinannya yang diperoleh sebagai pemberian dari orang tuanya, di adat batak disebut sebagai **“Harta Pauseang”**. Biasanya Pauseang ini dapat berupa barang tidak bergerak seperti rumah, tanah atau sawah, dan barang bergerak seperti perhiasan, keperluan rumah tangga atau pakaian.

Yang termasuk dalam pengertian harta bawaan adalah juga termasuk harta atau barang yang dimiliki oleh suami/isteri sebagai bagian warisan dari harta warisan orang tuanya yang telah meninggal, juga harta atau barang yang diterima dari orang lain sebagai pemberian (hibah).

- **Harta bersama suami dan isteri (harta pencaharian)**

Harta bersama suami dan isteri adalah merupakan harta yang didapat dan dihasilkan selama suami dan isteri masih terikat dalam suatu perkawinan. Bisa merupakan hasil jerih payah dari pekerjaan masing-masing suami dan isteri, atau bisa juga merupakan pemberian dari orang tua atau pihak ketiga lainnya. Perempuan batak toba yang sudah menikah, sering menerima pemberian dari ayahnya berupa sawah, pada saat perempuan tersebut sudah melahirkan anak, pemberian tersebut ditujukan

siayah perempuan (kakek) kepada cucunya. Pemberian ini dalam adat Batak disebut juga dengan pemberian "**Indahan Harian**".

- **Harta pusaka**

Harta pusaka menurut pendapat Bapak Tumpun Sinaga, pada sebagian masyarakat batak masih terdapat adanya harta pusaka, dimana harta itu sifatnya turun-temurun dari nenek moyang kepada keturunannya yang masih hidup sekarang, biasanya harta ini penguasaan dan pemeliharannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi, serta diserahkan tanggung jawabnya kepada anak laki-laki sulung atau yang dituakan. Harta pusaka yang ada biasanya dalam bentuk rumah (bangunan tua), tanah dan sawah.

Analisa

Harta Bawaan dan harta bersama milik orang tua dapat diwarisi secara bersama-sama oleh anak laki-laki dan anak perempuan, harta tersebut termasuk dalam harta peninggalan yang dapat terbagi-bagi, jadi dapat dikuasai dan dikelola secara individual oleh masing-masing ahli waris.

c. **Ahli Waris**

Hasil Penelitian

Menurut ketentuan yang ada, ahli waris utama dan pertama dari pemilik harta (pewaris) adalah anak-anaknya. Ahli waris utama adalah meliputi semua orang yang berhak untuk menjadi ahli waris berdasarkan hubungan darah

dengan si pewaris dalam suatu golongan atau kelompok, dimana golongan yang lebih utama akan menutup kemungkinan mewaris bagi golongan kedua.

Menurut Bushar Muhammad, keturunan dapat bersifat³³

- Lurus

Apabila orang seorang merupakan keturunan langsung dari yang lain, misalnya antara bapak dan anak, antara kakek, bapak dan anak, disebut lurus kebawah kalau rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan disebut lurus keatas kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek.

- Menyimpang atau bercabang

Apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya.

Selain keturunan dapat bersifat lurus atau menyimpang, keturunan ada tingkatan atau derajat. Tiap kelahiran merupakan satu tingkatan, atau derajat, jadi misalnya seorang anak merupakan keturunan tingkat 1 (satu) dari bapaknya, cucu merupakan keturunan tingkat 2 (dua) dari kakeknya, dan sebagainya.

Menurut hukum adat batak ada 7 golongan dalam ahli waris :

1. Keturunan langsung/anak beserta keturunannya.

³³ Bushar Muhammad, Op-Cit, Hal.4

2. Orang Tua (ayah dan ibu).
3. Saudara beserta keturunannya.
4. Orang Tua dari Orang Tua (berjumlah 4 orang).
5. Saudara dari Orang Tua beserta keturunannya.
6. Orang Tua dari Orang Tua dari Orang Tua (berjumlah 8 orang).
7. Saudara dari orang Tua dari Orang Tua beserta keturunan dari saudara tersebut.

Kedudukan para ahli waris adalah sebagai berikut :

- Anak Laki-Laki (Anak Kandung).

Di masyarakat batak toba, anak laki-laki (anak kandung) kedudukannya adalah sebagai ahli waris dari orang tuanya atas harta warisan. Hal ini sesuai dengan sistem pewarisan yang dianut yaitu sistem patrilineal. Dalam perkembangannya yang terjadi pada saat ini khususnya pada masyarakat batak di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon anak perempuan juga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak laki-laki sebagai ahli waris atas harta warisan orang tuanya. Hal ini dialami juga oleh Bapak Tumpun Sinaga dan Bapak Drs. Bona Sihotang, dimana dalam keluarganya pembagian atas harta warisan orang tuanya baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama dengan mendapatkan warisan dari orang tuanya yang dilakukan secara sama rata yaitu baik kepada anak laki-laki maupun kepada anak perempuan.

- Anak Perempuan (Anak Kandung).

Di batak toba dalam perkembangan yang terjadi pada saat ini khususnya di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak laki-laki dimana anak perempuan sudah mendapat bagian harta warisan dari orang tuanya yang sama dengan anak laki-laki. Hal ini di dukung juga dengan keterangan dari para responden, yaitu : Ibu Tiolina Br.Sinaga, dimana dia mendapatkan sebidang tanah yang telah ditanami tanaman buah-buahan yang terletak di Parapat; Ibu Tamaria Br.Sinaga, dimana dia mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sebidang tanah di Parapat yang kini telah berdiri rumah diatas tanah tersebut sebagai tempat tinggalnya; Ibu Pancawati Br.Sihotang, dimana dia mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sebidang tanah pertanian di Parapat; Ibu Rismaulina Br.Sitio, dimana dia mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sebidang tanah yang terletak di Siantar; Ibu Kastorlina Br.Simarmata, dimana dia mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Bage; Ibu Hileria Br.Sihotang, dimana dia mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Sibaganding; Ibu Dorlan Br.Manurung, dimana dia mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sebidang tanah pertanian yang terlatak di Desa Tombak Pulau-Pulau, Siantar Sawah; Ibu Rauliyah Br.Sitompul, dimana dia mendapatkan harta warisan dari orang tuanya

berupa perhiasan dan pertapakan tanah yang terletak di Sungai Padang, Perkebunan Tinjauan; Ibu Melda Br.Siahaan, dimana dia mendapatkan harta warisan dari orang tuanya berupa perhiasan emas dan uang tunai; Ibu Nova Br.Sitinjau, dimana dia mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sebidang tanah pertapakan yang terletak di Desa Sipangan Bolon.

Seluruh responden tersebut diatas mendapatkan warisan dari orang tuanya secara Hibah ataupun secara Hibah Wasiat, yang merupakan keinginan atau amanat terakhir dari pewaris sebelum dia meninggal.

- Janda

Menurut bapak Tumpun Sinaga, pada suku batak ada dua macam kedudukan janda :

▪ Janda tidak punya anak

Janda yang pada saat ini suaminya meninggal, menurut tradisi adat batak maka otomatis si janda tersebut keluar dari ikatan kekerabatan atau marga keluarga suaminya. Jadi janda tersebut tidak mempunyai hak untuk mewaris dari harta warisan peninggalan suaminya.

▪ Janda punya anak

Kedudukan janda jika dia punya anak adalah bukan sebagai ahli waris dari suaminya yang telah meninggal, akan tetapi janda itu mempunyai hak untuk menikmati hasil dari seluruh harta warisan peninggalan suaminya selama janda itu membutuhkannya dan selama

hidupnya, dengan batasan dia tidak melakukan perkawinan lagi. Jadi janda tersebut masih terikat dalam ikatan kekerabatan atau marga keluarga suaminya. Janda adalah sebagai jembatan pewarisan dari si ayah kepada anak-anaknya. Itu sebabnya pula biasanya, harta warisan baru dibagi pada saat kedua suami isteri meninggal.

- Anak Angkat

Menurut bapak Tumpun Sinaga, di dalam adat batak dikenal dengan istilah “Anak Nanianin”, yaitu anak angkat yang menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, dan dia tidak dapat mewaris dari orang tua kandungnya. Biasanya pengangkatan anak dilakukan oleh suami isteri yang tidak mempunyai anak laki-laki atau sama sekali tidak mempunyai anak. Dimana anak tersebut berasal dari anak saudaranya atau keluarga dekat lainnya. Pelaksanaanya dilakukan dengan upacara adat pada saat yang telah ditentukan, dan dihadiri oleh keluarga dekat, keluarga yang kedudukannya memenuhi unsur Dalihan Na Tolu, serta ketua-ketua adat. Adapun istilah upacara adat tersebut dalam adat batak disebut dengan “Dirajahon”.

Analisa

Setelah melihat hasil penelitian mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, tampak bahwa hukum waris adat, khususnya adat batak dalam perkembangannya pada saat ini yang mempunyai hak waris bukan saja

anak laki-laki tetapi juga anak perempuan mempunyai hak waris atas harta warisan dari orang tuanya.

3. Pelaksanaan/proses pembagian warisan dan perkembangannya.

Hasil Penelitian

a. Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Masih Hidup).

Salah satu keunikan dari hukum waris adat, khususnya dalam waris adat batak pembagian atau pemberian warisan dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup. Hal ini dikenal dengan istilah hibah, pemberian tersebut dilakukan oleh pewaris pada saat ia masih hidup dengan maksud sebagai modal untuk anak-anaknya atau ahli warisnya dalam membangun rumah tangga baru.

Menurut pendapat Bapak Tumpun Sinaga, hibah seperti ini dapat dipersamakan atau dihitung sebagai bagian warisan. Hal ini didukung berdasarkan keterangan dari responden Ibu Dorlan Br.Manurung, Ibu Tiolina Br.Sinaga, Ibu Tamaria Br.Sinaga, dimana semasa hidup orang tua mereka telah membagikan warisan yang sama rata terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini dilakukan sebagai pertimbangan dari orang tua mereka untuk memberikan bekal hidup bagi anak-anaknya yang telah dewasa, agar dapat hidup mandiri.

b. Setelah Pewaris Meninggal Dunia.

Merupakan hal yang sering terjadi, biasanya harta warisan dari orang tua dibagi setelah kedua orang tua meninggal dunia. Hal ini juga di dukung berdasarkan keterangan dari responden Ibu Rismaulina Br.Sitio, Ibu Hileria Br.Sihotang, Ibu Pancawati Br.Sihotang, Ibu Kastorlina Br.Simarmata, Ibu Rauliyah Br.Sitompul, Ibu Melda Br.Siahaan, dan Ibu Nova Br.Sitinjak.

Menurut keterangan para responden tersebut diatas, walaupun pembagian harta warisan orang tuanya tersebut dibagikan setelah kedua orang tua mereka meninggal, namun baik anak laki-laki maupun anak perempuan tetap mempunyai kedudukan dan hak yang sama terhadap harta warisan orang tua mereka.

Sebelum harta warisan tersebut dibagikan biasanya diselesaikan atau dibayarkan terlebih dahulu utang-utang yang ditinggalkan oleh si pewaris, baru kemudian sisa dari harta warisan tersebut yang dibagi-bagikan kepada ahli waris.

Selain mengenal hibah dalam arti pemberian yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup, dalam hukum waris adat, khususnya hukum waris adat batak juga dikenal istilah hibah wasiat, yang berisi pesan terakhir dari pewaris yang hendak meninggal dunia, yang bertujuan memberitahukan kehendaknya kepada ahli warisnya tentang bagaimana pembagian terhadap semua hartanya, baik harta bawaan, maupun harta bersama (harta pencaharian), utang-utangnya, atau kalau misalnya ada suatu benda tertentu, benda bergerak atau

lain diluar keluarga. Hibah wasiat baru berlaku setelah pewaris itu meninggal. Tujuan dari adanya hibah wasiat atau pesan terakhir dari pewaris adalah untuk menghindarkan timbulnya sengketa diantara para ahli warisnya akan tetap terjaga damai. Hibah wasiat dapat diucapkan secara lisan dihadapan para ahli warisnya atau saksi kerabat lainnya. Sekarang ini hibah wasiat khususnya di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon banyak dituangkan dalam bentuk tertulis.

Analisa

Dalam hukum waris adat batak, terdapat 3 (tiga) unsuryang saling berkaitan satu sama lain yaitu adanya pewaris, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, harta warisan, dan ahli waris. Hal ini tidak terlepas dari adanya ikatan kekerabatan/kekeluargaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat indonesia. Oleh karena itu perlu pula diperhatikan kaitan hukum waris adat dengan hukum kekeluargaan adat serta hukum perkawinan adat, untuk menentukan bagaimana kedudukan seseorang, khususnya atas bagian warisan.

Dari hasil penelitian diatas, maka saat ini dapat jelas terlihat, bahwa sistem kemasyarakatan patrilineal, dimana hanya mementingkan kedudukan laki-laki saja, telah berkembang dan berubah menjadikan adanya kesamaan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, sistem kemasyarakatan patrilineal pada suku batak, khususnya masyarakat atau orang batak yang berada di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon telah berkembang kearah sistem parental atau bilateral.

C. Faktor-faktor Yang Dapat Mempengaruhi Perkembangan Dalam Pembagian Warisan Adat Batak

Hasil Penelitian

Salah satu subyek hukum yang merupakan pendukung hak adalah masyarakat, yang senantiasa mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut akan membuat masyarakat berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks.

Begitu juga pada setiap individu akan senantiasa mengadakan interaksi dengan sesamanya, karena dengan melalui interaksi setiap individu akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah. Yang lebih penting lagi dengan adanya perubahan-perubahan itu, pola perilaku tiap warga masyarakat cenderung mengalami perubahan dan akibat dari perubahan itu menyebabkan tiap individu dapat menyesuaikan dirinya dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan.

Adanya perkembangan yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat pada dasarnya disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat intern dan ekstern. Perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor intern antara lain dapat berasal dari adanya penambahan atau pengurangan jumlah penduduk, adanya penemuan atau inovasi baru, adanya pertentangan maupun karena adanya revolusi. Sedangkan perubahan yang disebabkan oleh faktor ekstern adalah dapat berasal dari alam, seperti gempa bumi, banjir dan kemarau, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan dalam hukum waris adat batak, khususnya tentang hak waris perempuan batak. Adapun faktor-faktor tersebut adalah antara lain :

1. Faktor Pendidikan

Dari hasil penelitian dengan diadakan observasi langsung dilapangan, dalam perkembangannya pada saat ini faktor pendidikan salah satu faktor yang mempengaruhi hukum waris adat batak, khususnya tentang hak waris perempuan, karena bukan hanya anak laki-laki saja yang mengenyam pendidikan kejenjang perguruan tinggi, tetapi juga anak perempuan khususnya perempuan batak mendapatkan hak sama untuk melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi, sehingga mempengaruhi juga cara berpikir anak perempuan tersebut..

Selain itu juga dewasa ini sudah banyak perempuan batak yang telah berhasil menduduki jabatan yang tinggi, seperti hakim, jaksa, notaris, pengacara, dosen, guru besar, dan lain sebagainya. Maka dengan ini kedudukan perempuan dapat dikatakan sejajar atau sederajat dengan laki-laki, begitu juga dalam hal pewarisan khususnya menurut hukum waris adat batak yang telah berkembang, kedudukan perempuan sudah sejajar dengan laki-laki, yaitu adanya persamaan hak waris bagi perempuan dan laki-laki.

2. Faktor Ekonomi

Setelah penulis mengamati perkembangan jalannya roda perekonomian khususnya di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, maka terlihat bahwa kaum perempuan batak sudah banyak ambil bagian dalam hal mencari nafkah hidup, hal ini tidak lepas dari banyaknya kesempatan kerja yang ditawarkan bagi kaum perempuan. Berbagai macam kesempatan kerja ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kaum perempuan. Hal ini didukung oleh keterangan para responden, dimana selain sebagai ibu rumah tangga juga bekerja, seperti pegawai negeri, karyawati di perusahaan perhotelan, dan berdagang.

3. Faktor Agama

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis maka faktor agama juga dapat mempengaruhi perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam pewarisan, khususnya waris adat batak. Hal ini di dukung dari keterangan responden Ibu Rauliyah, dimana dia selain mendapat hibah juga dia mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, karena membagi warisan menurut waris Islam, yaitu bagian anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan.

4. Faktor Perantauan/Migrasi

Faktor perantauan/migrasi dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi hukum waris adat batak karena sudah banyak masyarakat atau orang-orang batak yang merantau ke luar dari kampung halamannya atau

keluar Sumatera Utara, misalnya ke Jawa. Di tempat perantauan mereka melihat bahwa sistem pewarisannya berdasarkan sistem Parental, yaitu sistem keturunan yang menarik keturunan dari garis ayah dan garis ibu, hal ini menyebabkan pelaksanaan pembagian warisannya dilakukan sama rata antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan.

Orang batak di perantauan melihat bahwa sistem pembagian warisan yang sama rata terhadap laki-laki dan perempuan itu banyak memiliki kelebihan dibandingkan sistem pembagian warisan adat batak yang asli yaitu hanya anak laki-laki saja yang mendapat bagian warisan.

5. Faktor Komunikasi dan Teknologi Informasi

Adanya peningkatan frekwensi hubungan atau komunikasi antar masyarakat, tidak lepas dari adanya kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi dan industri.

Pada masa sekarang ini, komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, ada telepon, telepon selular, internet dan televisi, sehingga informasi dapat lebih cepat menyebar luas. Hal ini dapat mengubah pula pola kehidupan masyarakat yang ada, dalam hal tradisi adat, segala bentuk informasi dari luar akan mampu merubah struktur yang telah ada dalam tradisi adat yang dirasakan telah kaku atau monoton, sehingga terjadilah perubahan kebudayaan.

D. Penyelesaian Perselisihan Dalam Waris Adat Batak

Hasil Penelitian

1. Secara Musyawarah

Menurut Bapak Tumpun Sinaga, musyawarah dilakukan jika terjadi perselisihan atau sengketa dalam hal pembagian warisan adat batak ada dua tahap, yaitu :

a. Musyawarah dalam lingkungan keluarga

Dalam pelaksanaan pembagian warisan, sering kita mendengar terjadinya perselisihan atau sengketa. Biasanya terjadinya perselisihan atau sengketa tersebut karena ada pihak keluarga yang merasa tidak puas dengan bagiannya terhadap harta warisan yang ada, atau bahkan karena ia tidak mendapat bagian dari harta warisan yang ada. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan kerenggangan dalam hubungan kekeluargaan diantara anggota keluarga tersebut, bahkan sering terjadi satu anggota keluarga menjadi bermusuhan dengan anggota keluarga yang lain, permusuhan itu bisa berlarut-larut bahkan bisa juga bertahun-tahun lamanya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sengketa yang terjadi adalah karena anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan. ^{di} ~~di~~ Batak Toba, biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah diantara para anggota keluarga. Yang menjadi pemimpin dari musyawarah tersebut adalah anak laki-laki

sulung atau anak laki-laki yang dituakan dari keluarga tersebut, atau kalau tidak ada anak laki-laki, saudara atau kerabat dari pihak ayah.

b. Musyawarah adat

Musyawarah adat terjadi bila perselisihan atau sengketa pembagian warisan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dalam lingkungan keluarga, maka perselisihan atau sengketa tersebut dibawa ke dalam musyawarah adat. Dimana dipimpin oleh Ketua Adat atau orang yang dituakan dalam adat Batak, dengan dihadiri oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.

Khusus masyarakat adat Batak di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, perselisihan atau sengketa dalam hal pembagian warisan adat Batak menurut responden Bapak Tumpun Sinaga, jarang sekali sampai ke tahap musyawarah adat, biasanya bila terjadi perselisihan atau sengketa dalam hal pembagian warisan adat batak, cukup sampai pada tahap musyawarah dalam lingkungan keluarga saja, karena untuk menjaga nama baik keluarga yang berselisih.

2. Secara Pengajuan Gugatan ke Pengadilan

Ada banyak pula sengketa pembagian warisan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah keluarga maupun musyawarah adat, sehingga para pihak kemudian mengajukan gugatan perselisihan atau sengketa ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian terhadap penyelesaian perselisihan atau sengketa warisan yang diselesaikan di

pengadilan dengan cara mengamati beberapa yurisprudensi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, khususnya yang berkaitan dengan perselisihan atau sengketa warisan dalam hukum waris adat Batak, dimana kemudian sengketa tersebut diselesaikan dengan memberikan hak atas bagian warisan bagi perempuan.

Hukum waris adat Batak yang dikembangkan melalui yurisprudensi tidak jarang tidak jarang sudah berbeda dengan hukum adat asli di Batak, karena sudah dimodernisasi agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini. Yurisprudensi tersebut antara lain :

- Yuripsrudensi Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961³⁴ :

Berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan umum juga atas hakekat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal harta (pewaris), bersama-sama berhak atas harta warisan, dengan kata lain bagian seorang anak laki-laki adalah sama dengan bagian seorang anak perempuan.

Yurisprudensi ini kemudian menjadi tonggak keadilan dalam hal pewarisan menurut hukum adat batak, dimana dalam perkara-perkara yang

³⁴ Soleman Biasane Taneko, "Dasar-dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum Adat", Alumni, Bandung 1981, Hal.97.

sama yang timbul dikemudian hari, yurisprudensi ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum, dan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan penyelesaian sengketa warisan.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415/K/SIP/1970 tanggal 30 Juni 1971 :

Hukum Adat di daerah Padang Sidempuan, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak (laki-laki dan perempuan) terhadap warisan orang tua. Di daerah Tapanuli pemberian dan penyerahan kepada seorang anak perempuan merupakan “serah Lepas” dengan maksud memperlunak hukum adat setempat yang pada mulanya tidak mengakui hak mewaris bagi anak perempuan. Jadi pada saat ini, hukum adat di Tapanuli telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971 tanggal 31 Juli 1973 :

Hukum Adat di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak perempuan terhadap warisan dari orang tuanya, dalam hal ini pewaris yang telah meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan, maka anak perempuan inilah yang merupakan satu-satunya ahli warisnya dan yang berhak atas harta yang ditinggalkannya.

Analisa

Kita sering mendengar bahwa betapa peliknya masalah pembagian warisan, terkadang proses pembagian warisan dapat diselesaikan secara baik, tetapi sering pula terjadi perselisihan atau sengketa yang melibatkan berbagai pihak. Sengketa yang sering terjadi adalah karena para ahli waris merasa tidak puas akan bagian warisannya, hal ini dapat mengakibatkan perpecahan dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, semestinya mengenai masalah warisan ini, agar selalu dapat terjadi pembagian yang adil dan damai, mestinya setiap anggota keluarga memiliki rasa kasih sayang dan tenggang rasa yang besar terhadap anggota keluarga yang lainnya, dan menjauhkan rasa ingin menang sendiri atau sifat egoistis.

Bila kemudian masalah perselisihan atau sengketa warisan sampai ke pengadilan, dengan bekal sudah adanya yurisprudensi mengenai persamaan hak waris terhadap anak laki-laki dan anak perempuan, maka diharapkan pada perkembangan hukum selanjutnya yurisprudensi tersebut diatas dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya mengenai perselisihan atau sengketa warisan dikemudian hari.

UPT-PUSTAK-UNDIP

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Masyarakat adat Batak yang sistem pewarisannya menganut sistem patrilineal, dimana pada awalnya hak waris atas harta warisan dari pewaris adalah pihak laki-laki atau anak laki-laki saja sedangkan pihak perempuan atau anak perempuan tidak mempunyai hak waris atas harta warisan si pewaris. Akan tetapi pada perkembangannya yang terjadi pada saat ini pihak perempuan atau anak perempuan sudah ada yang mendapatkan bagian warisan dari harta warisan si pewaris, khususnya yang terjadi di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.
2. Terjadinya perubahan mengenai hak waris perempuan dalam hukum waris adat Batak dalam perkembangannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : adanya perubahan sosial dalam masyarakat, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor agama, faktor perantauan/migrasi dan faktor komunikasi dan teknologi informasi.
3. Sedangkan langkah-langkah yang sering ditempuh apabila terjadi perselisihan atau sengketa dalam hal pembagian warisan dalam adat batak, maka langkah penyelesaian yang ditempuh adalah dengan dua cara, yaitu cara musyawarah dan mufakat serta dengan cara penyelesaian perkara di pengadilan.

B. Saran.

- Sudah saatnya sekarang ini Hukum Waris Adat Batak tidak lagi membedakan hak waris antara anak laki-laki dengan anak perempuan sesuai dengan falsafah batak yang pernah dikenal yaitu “Dompak Marmeme Anak Sona Tundal Marmeme Boru”, dimana arti falsafah tersebut adalah bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama dalam segala hal, begitu juga dengan hak untuk mewaris terhadap harta warisan pewaris.
- Kiranya dalam menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa dalam hal hukum waris adat batak perlu ditempuh jalan musyawarah hanya dalam lingkungan keluarga saja, tidak sampai ke pengadilan, karena akan merugikan para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuzulhrah, Muhammad, "Hukum Waris menurut Imam Ja'far Shadig", Lentera, Jakarta 2001.
- Bastian Tafal, B, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta Akibat-Akibatnya Dikemudian Hari", Penerbit CV.Rajawali, Jakarta 1983.
- Basyir, KH.Ahmad Azhar, "Hukum Waris Islam", UII Press, Yogyakarta 2001.
- Hadi Kusuma, Hilman, "Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat", Penerbit Alumni, Bandung 1980.
- Hadi Kusuma, Hilman, "Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama Hindu-Islam", Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1991.
- Hadi Kusuma, Hilman, "Hukum Waris Adat", Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1999.
- Al Faraid, A Hasan, "Ilmu Pembagian Waris", Pustaka Progresif, Surabaya 1984
- Mardalis, "Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal", PT. Bumi Aksara, Jakarta Oktober 1989.
- Malau Gens.G. (Ompu Linggom BAT.Pagar Lobak), "Aneka Ragam Ilmu Pengetahuan Budaya Batak", Penerbit Yayasan Bina Budaya Nusantara Tao Toba Nusan Budaya, Jakarta 2000.
- Muhammad, Bushar, "Pokok-Pokok Hukum Adat", Pradya Paramita, Jakarta 2000.
- Perangin, Effendi, "Hukum Waris", Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999.
- Projodikoro, Wirjono "Hukum Waris Di Indonesia", Bale Bandung, Bandung 1986
- Purba, Elvis F dan Purba, O.H.S, "Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak)", Monora, Medan Desember 1997.
- Rasyid Ariman, M, "Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi", Ghalia Indonesia, Jakarta 1988.
- Ridwan Halim, A, "Hukum Adat dalam Tanya Jawab", Ghalia Indonesia, Jakarta 1985.

Sianipar, S.H.W. (Ompu Ogani), "Tuho Parngoluon Dalihan Natolu Sistem Bermasyarakat Bangso Batak (Buku Pertama)", CV.Pustaka Gama, Medan 1991.

Soekanto, Disusun Kembali Oleh : Dr. Soejono Soekanto, S.H.M.A, "Meninjau Hukum Adat Indonesia", Penerbit Rajawali Pers, Jakarta Mei 1986.

Soekanto, Soerjono dan Soleman B.Taneko, "Hukum Adat Indonesia", Penerbit Rajawali Pers, Jakarta Agustus 1983.

Soemitro, Irma Setyawati, "Beberapa Aspek Kewarisan Pada Kekerabatan Matrilinial", Badan Penerbit UNDIP, Semarang 1994.

Soepomo, R, "Bab-Bab Tentang Hukum Adat", Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 2000.

Sugangga, I.G.N, "Hukum Adat Khusus (Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Yang Bersistem Patrilineal di Indonesia, Semarang".

Suwondo, Nani, "Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat", Ghalia Indonesia, Jakarta, April 1981.

Suparman, Eman, "Intisari Hukum Waris Indonesia", Armico, Bandung 1985.

Ter Haar, Terjemahan Soebakti Poesponoto, "Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat", Gunung Agung, Jakarta 1981.

Tamakiran, "Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum", Pionir Jaya, Bandung 1992.

Wignjodipoero, Soerjono, "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat", Gunung Agung, Jakarta 1985.